



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM**  
**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**PEMBIMBING:**

**Drs. Suradi, M.Si**

**Oleh:**

**ST. Ainun Jariah Rajab**

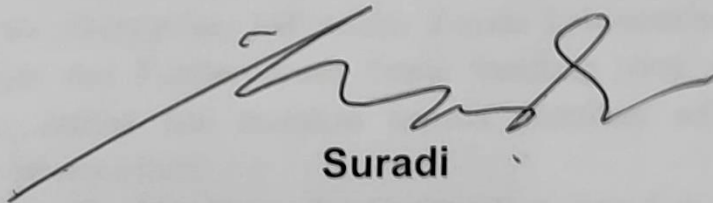
**20.03.075**

**PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**  
**TAHUN 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL  
Nama Mahasiswa : ST. AINUN JARIAH RAJAB  
NRP : 20.03.075  
Jurusan : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan  
Sosial

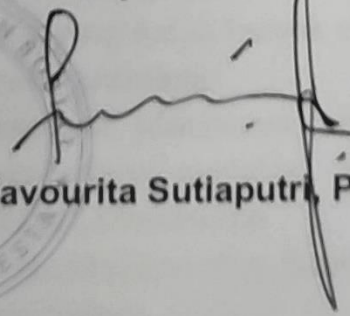
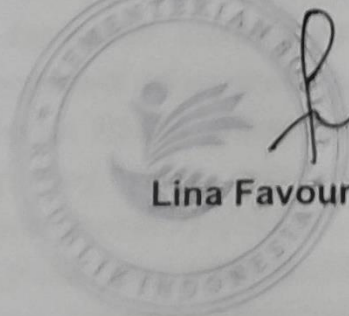
**Pembimbing :**



**Suradi**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial  
Program Sarjana Terapan  
Politeknik Kesejahteraan Bandung,**



**Lina Favourita Sutia Putri, Ph.D**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Praktikum Laboratorium pada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Walaupun demikian, praktikan berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan laporan ini baik dari hasil kegiatan di belajar di perkuliahan maupun menunaikan praktik di lokasi praktikum. Saran dan kritik yang bersifat membangun begitu diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya.

Keberhasilan dari proses dan penyusunan laporan Praktikum Laboratorium ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orang tua, serta berbagai pihak yang telah membantu praktikan selama berlangsungnya proses Praktikum Laboratorium. Oleh karena itu pada kesempatan ini praktikan menyampaikan ucapan terima kasih pada :

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Lina Favourita, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Bandung yang sudah memberikan arahan dan masukan demi kelancaran praktikum.
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Bandung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada praktikan selama pelaksanaan praktikum laboratorium.
4. Drs. Suradi, M,Si selaku Dosen Pembimbing Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Bandung yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada praktikan dengan penuh kesabaran dan pengorbanan waktu selama kegiatan praktikum laboratorium.
5. Adnan Hary, S.Sos, MM selaku lurah Kelurahan Minasatene yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan praktikum laboratorium.
6. Megawati Putri Rajab, S.Kep selaku pendamping PKH yang bertugas di Kelurahan Minasatene yang telah membantu selama pencarian isu masalah di lokasi praktikum.
7. Rekan-rekan kelompok 5 yang senantiasa saling memberikan motivasi dan afeksi selama pelaksanaan praktikum laboratorium dan penyusunan laporan
8. Saudara dan saudari kandung yang sudah banyak memberikan motivasi secara moril dan materil dalam proses praktikum
9. Teman-teman HMSS (Himpunan Mahasiswa Sulawesi Selatan) Poltekesos Bandung yang sudah memberikan motivasi, bantuan dan saran dalam penyusunan laporan Praktikum Laboratorium
10. Seluruh pihak yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungan selama pelaksanaan praktikum laboratorium.

Akhir kata, praktikan berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu bagi kemajuan serta perkembangan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Bandung.

Bandung, 29 April 2023

Praktikan

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	1
C. Waktu dan Lokasi Praktikum.....	3
D. Proses Praktikum.....	3
E. Sistematika Laporan.....	11
<b>BAB II PENDAHULUAN .....</b>	<b>13</b>
A. Profil Kecamatan/Kelurahan Minasatene .....	13
B. Profil Analisis Jaminan Sosial .....	13
1. Gambaran Umum Masalah .....	13
2. Tinjauan Konsep .....	14
3. Asesmen .....	23
4. Rencana Intervensi .....	27
C. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	33
1. Gambaran Umum Masalah .....	33
2. Tinjauan Konsep .....	33
3. Asesmen .....	40
4. Rencana Intervensi .....	42
D. Profil Pemberdayaan Sosial .....	47
1. Gambaran Umum Masalah .....	47
2. Tinjauan Konsep .....	48
3. Asesmen .....	51
4. Rencana Intervensi .....	55
E. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	61
1. Gambaran Umum Masalah .....	61
2. Tinjauan Konsep .....	61
3. Asesmen .....	66
4. Rencana Intervensi .....	68
F. Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	73
1. Gambaran Umum Masalah .....	73
2. Tinjauan Konsep .....	74
3. Asesmen .....	77

4. Rencana Intervensi .....	80
<b>BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Rekomendasi.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sistem Partisipan .....	28
Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya .....	30
Tabel 2.3 Analisis SWOT .....	31
Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan .....	32
Tabel 2.5 Sistem Partisipan .....	44
Tabel 2.6 Rencana Anggaran Biaya .....	45
Tabel 2.7 Analisis SWOT .....	45
Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan .....	46
Tabel 2.9 Sistem Partisipan .....	57
Tabel 2.10 Rencana Anggaran Biaya .....	58
Tabel 2.11 Analisis SWOT .....	58
Tabel 2.12 Jadwal Kegiatan .....	59
Tabel 2.13 Sistem Partisipa .....	69
Tabel 2.14 Rencana Anggaran Biaya .....	71
Tabel 2.15 Analisis SWOT .....	71
Tabel 2.16 Jadwal Kegiatan .....	72
Tabel 2.17 Sistem Partisipan .....	80
Tabel 2.18 Rencana Anggaran Biaya .....	82
Tabel 2.19 Analisis SWOT .....	82
Tabel 2.20 Jadwal Kegiatan .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Profil Jaminan Sosial .....	26
Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah Profil Sumber Dana Bantuan Sosial .....	41
Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Profil Pemberdayaan Sosial .....	54
Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Profil Penataan Lingkungan Sosial.....	67
Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Profil Penanggulangan Bencana .....	78



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pembekalan Praktikum Laboratorium .....	89
Lampiran 2 Kegiatan Praktikum Laboratorium .....	92

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

### B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

#### 1. Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan

- b. ; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- c. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
- f. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
  - 1) Pendekatan Awal
  - 2) Asesmen
  - 3) Perencanaan Intervensi

## **2. Manfaat praktikum laboratorium :**

- a. Bagi Mahasiswa :
  - 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
  - 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan

mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.

- 6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
  - a) Pendekatan awal
  - b) Asesmen
  - c) Rencana Intervensi
- b. Bagi Lembaga :
  - 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
  - 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

### **C. Waktu dan Lokasi Praktikum**

Lokasi praktikum di Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
  - a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
  - b. Serah Terima Praktikan : 3 Februari 2023
2. Lapangan (*Indoor*) : 6 Februari - 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
  - a. Bimbingan laporan : 16 - 26 April 2023
  - b. Pendaftaran ujian : 27 - 29 April 2023
  - c. Ujian Lisan Praktikum : 1 - 2 Mei 2023
  - d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3- 11 Mei 2022

### **D. Proses Praktikum**

Proses praktikum laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
2. Pembekalan Umum

Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh nara sumber yang terdiri dari :

  - a. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
  - b. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

3. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:
  - a. *Review* tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui *Google Classroom*
  - b. Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan
  - c. Melakukan Praktik, demonstrasi, *role playing* tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
    - 1) Mengenal populasi kelompok sasaran (*population target group*) dan lingkungan sosialnya.
    - 2) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
    - 3) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
    - 4) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
  - d. Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium
  - e. Serah terima praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum Serah terima praktikan, dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media *zoom meeting* dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.

#### 4. Tahap Lapangan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial
  - 1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam implementasi jaminan sosial
    - b) Model jaminan sosial yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan jaminan sosial
    - d) Merancang program jaminan sosial
    - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program jaminan sosial

- f) Stakeholder terkait program jaminan sosial.
- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, dengan materi:
  - a) Pembekalan Materi tentang gambaran umum Program Jaminan Sosial
  - b) Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayosos untuk melaksanakan pekerjaan terkait jaminan sosial
  - c) Peluang kerja terkait bidang jaminan sosial
- 3) Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayosos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
 

Pengetahuan:

  - a) Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia
  - b) Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial
  - c) Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial
  - d) Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial

Keterampilan :

  - a) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  - b) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
  - c) Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial
  - d) Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
  - e) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum.
- 4) Praktik Analisis Jaminan Sosial, meliputi :
  - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial
  - b) Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
  - d) Menyusun laporan praktik analisis jaminan sosial
- b. Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial
  - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,

- b) Model sumber dana bantuan sosial, yang digunakan
  - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
  - d) Merancang program sumber dana bantuan sosial,
  - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial
  - f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial,
- 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, dengan materi:
- a) Pembekalan Materi tentang gambaran umum program sumber dana bantuan sosial
  - b) Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait sumber dana bantuan sosial
  - c) Peluang kerja terkait bidang sumber dana bantuan sosial
- 3) Peningkatan Kompetensi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
- a) Pengetahuan
    - (1) Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya
    - (2) Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
    - (3) Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan sumber dana bantuan sosial
    - (4) Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
    - (5) Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
    - (6) Menguasai konsep *monitoring* dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
  - b) Keterampilan
    - (1) Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
    - (2) Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial.
    - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
    - (4) Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan

dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial

(5) Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial

- 4) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi :
  - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
  - b) Melakukan asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun rencana intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial
- c. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial
  - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi / industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam implementasi pemberdayaan sosial,
    - b) Model pemberdayaan sosial, yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pemberdayaan sosial,
    - d) Merancang program pemberdayaan Sosial,
    - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program Pemberdayaan Sosial
    - f) *Stakeholder* terkait program Pemberdayaan Sosial
  - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat, dengan materi:
    - a) Pembekalan materi tentang gambaran umum program pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat
    - b) Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat
    - c) Peluang kerja terkait bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat
  - 3) Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:
    - a) Pengetahuan
      - (1) Menguasai konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
      - (2) Menguasai konsep dan teknologi pemberdayaan sosial



- (3) Menguasai konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
  - (4) Menguasai konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
  - (5) Menguasai konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
  - (6) Menguasai konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial
- b) Keterampilan
- (1) Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
  - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
  - (3) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
  - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
  - (5) Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
  - (6) Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
  - (7) Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
  - (8) Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
  - (9) Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
  - (10) Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial
- 4) Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial, meliputi :
- a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
  - b) Melakukan asesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun rencana intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial

- d. Peningkatan Kompetensi Analisis Penata Lingkungan Sosial
- 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola penataan lingkungan sosial, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
    - b) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial
    - d) Merancang program penataan lingkungan sosial
    - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
    - f) *Stakeholder* terkait program Penataan Lingkungan Sosial
  - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Sub direktorat Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, dengan materi:
    - a) Pembekalan materi tentang gambaran umum program Penataan Lingkungan Sosial
    - b) Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayasos untuk melaksanakan pekerjaan terkait Penataan Lingkungan Sosial
    - c) Peluang kerja terkait bidang Penataan Lingkungan Sosial
  - 3) Peningkatan Kompetensi Analisis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
    - a) Pengetahuan
      - (1) Menguasai konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
      - (2) Menguasai konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi
      - (3) Menguasai konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
      - (4) Menguasai konsep adaptasi ekologi manusia
      - (5) Menguasai konsep interaksi sosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
      - (6) Menguasai konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
      - (7) Menguasai konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
    - b) Keterampilan
      - (1) Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
      - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber

daya alam

- (3) Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- 4) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi :
  - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
  - b) Assesmen dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun Rencana Intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial
- e. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana
  - 1) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industri membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:
    - a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
    - b) Model penanggulangan bencana yang digunakan
    - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
    - d) Merancang program penanggulangan bencana
    - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
    - f) *Stakeholder* terkait program penanggulangan bencana
  - 2) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, dengan materi:
    - a) Gambaran umum program Penanggulangan Bencana
    - b) Kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa Prodi Lindayaso untuk melaksanakan pekerjaan terkait penanggulangan bencana
    - c) Peluang kerja terkait bidang penanggulangan bencana
  - 3) Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh dosen yang ditugaskan, dengan materi mengacu pada kompetensi Profil Analisis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
    - a) Pengetahuan
      - (1) Menguasai konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
      - (2) Menguasai konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
      - (3) Menguasai konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
      - (4) Menguasai konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
      - (5) Menguasai konsep standar minimum pemenuhan

kebutuhan dasar korban bencana

- b) Keterampilan
  - (1) Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
  - (2) Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
  - (3) Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
  - (4) Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
  - (5) Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
- 4) Praktik Analisis Penanggulangan Bencana, meliputi :
  - a) Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah- masalah dalam penanggulangan bencana
  - b) Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
  - c) Menyusun Rencana Intervensi
  - d) Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana
  - e) Tahap Pasca Lapangan
  - f) Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum
  - g) Ujian Lisan Praktikum
  - h) Perbaikan dan penyerahan laporan

#### **E. Sistematika Laporan**

Pada akhir kegiatan mahasiswa wajib membuat laporan akhir yang mencantumkan keseluruhan hasil kegiatan praktikum. Laporan akhir kegiatan praktikum disusun secara individu berdasarkan sistematika penyusunan laporan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, memuat tentang latar belakang; tujuan dan manfaat praktikum; sasaran kegiatan praktikum; waktu dan lokasi praktikum; proses praktikum; dan sistematika laporan.
- BAB II : Kajian Literatur, memuat tentang tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih serta konsep/teori yang relevan dengan profil Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana.
- BAB III : Kesimpulan dan Rekomendasi.

## II PRAKTIKUM LABORATORIUM

### A. Profil Kelurahan Minasatene

Awalnya Minasatene merupakan salah satu kelurahan dalam lingkup Kecamatan Pangkajene, kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep pada masa pemerintahan Bupati HA Gaffar Patappe, tepatnya pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2000, Kecamatan Pangkajene dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkajene, meliputi kelurahan-kelurahan sebelah barat dan Kecamatan Minasatene, meliputi kelurahan / desa di sebelah timur Pangkajene, ibu kota kabupaten. (Wajdi, M. Farid, 2004).

Pembentukan Kecamatan Minasatene ini merupakan bagian dari pendekatan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Sebelumnya berstatus sebagai kecamatan pembantu/perwakilan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor SK 81/II/1995 tanggal 6 Februari 1995 dan SK. 953/XI/Tahun 1998 tanggal 14 November 1998. Sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 66 (6) UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 4 Tahun 2000. Keputusan inilah yang menjadi dasar hukum peningkatan status kecamatan pembantu/perwakilan menjadi kecamatan definitif dengan mempersyaratkan pembentukannya melalui Peraturan Daerah (Perda). Pembentukannya mengacu pada ketentuan pasal 7 Kepmendagri Nomor 4 Tahun 2000 bahwa semua perwakilan kecamatan yang telah ada, dibentuk menjadi kecamatan dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Pangkep No 22/KPTS/VI/2000 tertanggal 14 Juni 2000. (Wajdi, M. Farid, 2004).

Sedangkan Kelurahan Minasa Te'ne sendiri terdiri dari 5 (lima) RW dan 12 (dua belas) RT, Kalabbirang, Bontoa, Biraeng, Bonto Kio, Kelurahan Bonto Langkasa, Desa Kabba, dan Desa Panaikang (Pasal 1 Perda No 13 Tahun 2000). Luas wilayah Kecamatan Minasa Te'ne sekitar 79,15 km<sup>2</sup> (berdasarkan data terbaru hasil survei Bakosurtanal, luas wilayah kecamatan ini adalah 96.479 km<sup>2</sup>) dengan batas – batas wilayah: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balocci (Pasal 4 Perda No. 13 Tahun 2000). Pusat pemerintahan Kecamatan Minasa Te'ne berkedudukan di Minasate'ne. (Makkulau, 2008).

### B. Profil Analisis Jaminan Sosial

#### 1. Gambaran Umum Masalah

Masyarakat selama ini masih banyak yang belum memahami data apa yang dipakai untuk menjadi acuan pemerintah untuk menentukan siapa saja masyarakat miskin dan rentan yang perlu untuk menjadi target sasaran

penerima program bantuan sosial dari pemerintah.

Realitanya yang terjadi di lapangan salah satunya di Kelurahan Minasatene yakni beberapa masyarakat yang tergolong ke dalam individu dan kelompok masyarakat miskin dan rentan nyatanya belum terdaftar namanya masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersebut. Dinilai dari berbagai aspek yang membuat mereka tergolong ke dalam Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) misalnya dari sumber mata pencaharian, tidak memiliki tempat tinggal layak huni beserta indikator kemiskinan lainnya. Juga beberapa orang masih bingung untuk melapor kepada siapa ketika mereka sendiri yang seharusnya terdaftar dalam DTKS namun tidak terdata sama sekali. Kebingungan dari mereka itupun menjadi masalah dikarenakan demikian itu membuat mereka tidak terdata sebagai orang yang layak untuk mendapatkan bantuan.

Dalam peninjauan langsung di rumah masyarakat masih ditemukan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan tetapi belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima beberapa bantuan sosial regular, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT).

Masih adanya beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dari data penerima bantuan sosial, walaupun jumlah yang ditemukan tidak terlalu banyak tetapi demikian itu perlu dilakukannya proses verifikasi dan perbaikan data yang harus terus dilakukan oleh pihak yang berwenang di lingkungan kantor Kelurahan Minasatene, sehingga penyaluran pada tahap berikutnya sudah sesuai dengan data yang tepat salah satunya dari usulan RT/RW. Bahkan ketidaktepat sasaran dari bantuan program ini melahirkan fenomena masalah di lingkungan masyarakat antara penerima bantuan sosial dan yang bukan penerima bantuan sosial, yaitu munculnya rasa kecemburuan sosial ketika masyarakat yang merasa dirinya berhak untuk dibantu oleh pemerintah malah tidak mendapatkan bantuan sepeser pun. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang masih hangat di lingkungan Kelurahan Minasatene.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Pengertian DTKS**

Pemerintah menggunakan acuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS Kemensos. Yang merupakan data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dasar hukum dari pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini diatur dalam Peraturan

Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 yang mencabut Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pengelolaan DTKS sendiri dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) yang terintegrasi. SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, serta penggunaan.

Dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui dinas sosial terkait atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi selanjutnya melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan pemerintah daerah untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Jika dalam hal verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan ditemukan ketidaksesuaian, maka pemerintah daerah provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

Namun jika data sudah sesuai, maka Kemensos akan menetapkan data yang disampaikan ke dalam DTKS. Data masyarakat yang sudah terdaftar dalam DTKS nantinya dapat menerima bansos yang digulirkan pemerintah. Terkait jenis bantuan yang diperoleh, hal itu kemudian tergantung pada kesesuaian kriteria penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara

#### b. Pengertian PPKS

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

##### 1) Jenis-Jenis PPKS

a) Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

- (1) terlantar/ tanpa asuhan yang layak
- (2) berasal dari keluarga sangat miskin / miskin
- (3) kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga
- (4) Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga
- (5) Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan
- (6) Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang

b) Anak Terlantar

Adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- (1) berasal dari keluarga fakir miskin
- (2) anak yang dilalaikan oleh orang tuanya
- (3) anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

c) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- (1) Disangka
- (2) Didakwa
- (3) Dijatuhi Pidana

d) Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk



melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- (1) menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempattempat umum
- (2) mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum

e) Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- (1) Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- (2) Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- (3) Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- (4) Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari

f) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a) anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun
- b) sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis
- c) pernah dianiaya dan/atau diperkosa
- d) dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

g) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang

disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- (1) berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
- (2) dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi
- (3) korban perdagangan manusia
- (4) korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual
- (5) korban eksploitasi, ekonomi atau seksual
- (6) dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil
- (7) menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- (8) terinfeksi HIV/AIDS

h) Lanjut Usia Telantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- (1) tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan
- (2) terlantar secara psikis, dan sosial

i) Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- (1) mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari
- (2) mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- (3) tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- (4) penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- (5) penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- (6) penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

j) Tuna Susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- (1) menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek
- (2) memperoleh imbalan uang, materi atau jasa

k) Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- (1) tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (2) tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap
- (3) tanpa penghasilan yang tetap
- (4) tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya

l) Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- (1) mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain
- (2) berpakaian kumuh dan compang camping
- (3) berada ditempat-tempat ramai/strategis
- (4) memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain

m) Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- (1) tidak mempunyai pekerjaan tetap
- (2) mengumpulkan barang bekas

n) Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti *gay*, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- (1) gangguan keberfungsian sosial
- (2) diskriminasi
- (3) marginalisasi
- (4) berperilaku seks menyimpang

o) Bekas Masyarakat Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- (1) seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 tahun
- (2) telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
- (3) kurang diterima/dijauhi atau diabaikan olehkeluarga dan masyarakat
- (4) sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
- (5) berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya

p) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kuaalitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- (1) seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun
- (2) telah terinfeksi HIV/AIDS

q) Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atautanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- (1) seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba
- (2) secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
- (3) tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya

r) Korban *Trafficking*

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- (1) mengalami tindak kekerasan
- (2) mengalami eksploitasi seksual
- (3) mengalami penelantaran
- (4) mengalami pengusiran (deportasi)
- (5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

s) Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- (1) mengalami perlakuan salah
- (2) mengalami tindakan eksploitasi
- (3) mengalami penelantaran
- (4) mengalami perlakuan diskriminasi dan dibiarkan dalam situasi berbahaya

t) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a) pekerja migran domestik
- b) pekerja migran lintas negara
- c) eks pekerja migran domestik dan lintas negara
- d) eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia
- e) pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*)
- f) pekerja migran miskin
- g) mengalami masalah sosial dalam bentuk : tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran/deportasi, mengalami

trafficking, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu

u) Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

- (1) korban terluka atau meninggal
- (2) kerugian harta benda
- (3) dampak psikologis
- (4) terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya

v) Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

- (1) korban jiwa manusia
- (2) kerugian harta benda
- (3) dampak psikologis

w) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- (1) perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun
- (2) istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan
- (3) menjadi pencari nafkah utama keluarga
- (4) berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak

x) Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- (1) tidak mempunyai sumber mata pencaharian
- (2) mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya
- y) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

  - (1) suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
  - (2) suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
  - (3) hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/ berkomunikasi; dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi
- z) Komunitas Adat Terpencil
 

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

  - (1) berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen
  - (2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan
  - (3) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau
  - (4) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem
  - (5) peralatan dan teknologinya sederhana
  - (6) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi
  - (7) terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik

### **3. Asesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

##### **1) Penyebab Masalah**

##### **a) Kurang Tanggapnya Pegawai Kelurahan Dalam Meng-Update DTKS**

Dalam lingkup kantor Kelurahan Minasatene pegawai yang mengurus dan mengajukan data terkait calon penerima bantuan sosial hanya satu orang. Dengan sedikitnya sumber daya manusia di kantor Kelurahan Minasatene yang menangani permasalahan terkait DTKS dan permintaan pengajuan dari

masyarakat untuk didaftarkan ke dalam DTKS mengakibatkan terhambatnya proses ini.

Juga ditemukan bahwasanya ada beberapa data masyarakat yang sudah meninggal dunia dan berpindah secara administrasi ke luar kota tetapi masih terdata di DTKS Kelurahan Minasatene, demikian ini mengecilkan peluang masyarakat yang harusnya benar-benar terdata tetapi tidak dimasukkan.

b) Adanya *Inclusion* dan *Exclusion Error* dalam DTKS

Ada dua masalah yang ditimbulkan dari tidak sinkronnya data, yakni *inclusion* dan *exclusion error*. Yang pertama disebut adalah masuknya orang yang tidak layak menerima ke dalam data, dan yang disebut belakangan adalah tidak masuknya orang yang layak menerima ke dalam data. Walaupun Kemensos yang dalam hal ini selaku penyelenggara program terus menyempurnakan DTKS tetapi pada realitnya akan selalu berhadapan dengan masalah data penerima bantuan sosial.

Kasus yang ditemukan di lapangan bahwasanya yang diusulkan oleh para pengurus di lingkungan masyarakat tidak pernah lepas dari campur tangan oknum yang hanya memasukkan kerabatnya dalam usulan pemutakhiran DTKS.

c) Tidak Adanya Sosialisasi Dari Pihak Kelurahan Ke Masyarakat

Pihak kelurahan tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang kurang mampu karena dinilai bahwasanya akan terjadi masalah baru di lingkungan masyarakat, seperti adanya masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kategori penerima bantuan akan ikut-ikutan mendaftarkan diri mereka juga. Demikian ini menjadi alasan dari pihak kelurahan yang tidak melaksanakan sosialisasi perihal pendataan DTKS.

2) Dampak Masalah

a) Penerima Bantuan Sosial Masih Ada yang Tidak Tepat Sasaran

Hal ini marak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, Kelurahan Minasatene pun tidak luput dari perosalan tersebut. Masyarakat penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah bahkan belum tersentuh sama sekali dikarenakan ketidaktepatan sasaran program dari data yang ada di kelurahan. Sedangkan masyarakat yang dinilai sudah mampu untuk menghidupi perekonomiannya sendiri tanpa bantuan malah justru mendapatkan program dari pemerintah.

b) Terjadinya Kecemburuan Sosial Antara Penerima Manfaat dan



yang Bukan Penerima Manfaat

Dibalik kebahagiaan penerima manfaat yang merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah ternyata masih ada segelintir masyarakat yang merasa kecewa bahkan merasakan kecemburuan sosial dikarenakan tidak tercatat sebagai bagian dari masyarakat yang layak mendapatkan perhatian pemerintah berupa bantuan sosial.

Salah satu contoh kasus yang bahkan terjadi di Kelurahan Minasatene yaitu dua orang bersaudara yang salah satunya merupakan penerima manfaat dari PKH dan yang satunya tidak mendapatkan PKH padahal dilihat dari kondisi taraf kehidupan hampir sama berada di taraf kemiskinan yang perlu uluran bantuan. Mereka kemudian tidak saling bertegur sapa ketika si KPM PKH dari mengambil uang bansosnya di kantor pos, saudaranya merasa cemburu karena berfikir mengapa ia tidak mendapatkan uang itu juga padahal mereka sama-sama keluarga pra sejahtera.

### 3) Fokus Masalah

Dari permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu “Masyarakat Yang Kurang Paham Terkait Informasi Tentang DTKS Beserta Cara Mendaftarkan Diri Ke Dalam Sistem Melalui Kantor Lurah Minasatene”.

#### 4) Analisis Pohon Masalah



Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Profil Jaminan Sosial

#### b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya terdaftar DTKS bagi yang kurang mampu
- 2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Minasatene terhadap DTKS
- 3) Memberikan pemahaman bagaimana mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam DTKS

#### c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Potensi yang terdapat disekitar maupun di dalam Kelurahan Minasatene adalah sebagai berikut :

##### 1) Kantor Kelurahan Minasatene

Dalam pelaksanaan rencana intervensi, Kantor Kelurahan Minasatene bisa dijadikan sebagai wadah mengedukasi masyarakat terkait informasi yang berhubungan dengan DTKS. Disini fungsi Kantor Kelurahan sebagai media yang akan dijadikan tempat

berkumpul oleh masyarakat.

2) Pegawai Kantor Kelurahan Minasatene

Dalam pelaksanaan intervensi, pegawai yang akan berperan sebagai *educator* dalam pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat, yang tentunya akan memberikan pemahaman terkait DTKS hingga alur pendaftaran.

3) Pendamping PKH dan Pendamping TKSK

Dalam pelaksanaan rencana intervensi, Pendamping PKH dan Pendamping TKSK akan menjadi fasilitator yang turut mendampingi masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan. Yang kemudian turut memberikan pemahaman-pemahaman yang kiranya perlu diketahui oleh masyarakat.

#### 4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Masyarakat miskin dan rentan merupakan individu dan kelompok yang sudah sepatutnya menjadi perhatian dan fokus dari pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti untuk mendapatkan program bantuan sosial yang sudah menjadi tanggung jawab negara dalam menjalankan jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin masyarakat negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Jaminan sosial bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Dengan terdaftarnya masyarakat miskin dan rentan ini ke dalam DTKS akan memperbesar kemungkinan mereka untuk mendapatkan program jaminan sosial dari pemerintah. Maka diperlukan pemahaman akan konsep, tujuan dan pentingnya mereka masuk untuk terdaftar DTKS, terkhususnya yang ada di wilayah Kelurahan Minasatene ini.

Tidak sedikit masyarakat yang bermukim di dalam wilayah administratif Kelurahan Minasatene belum memahami jelas apa itu DTKS, tujuan DTKS juga pentingnya DTKS yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan peserta calon penerima bantuan sosial.

Ketika ditanyakan apakah masyarakat tersebut sudah terdaftar dalam DTKS, maka beberapa dari responden kemudian menanyakan kembali apa yang dimaksud DTKS tersebut. Demikian ini menyulitkan masyarakat untuk menerima bantuan sosial dikarenakan pemerintah Indonesia menjadikan DTKS sebagai dasar atau acuan dalam memilih penerima manfaat dari program bantuan sosial dari pemerintah.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1) Tujuan Umum

Program yang akan dilaksanakan ini untuk bagaimana masyarakat yang berada dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memiliki pemahaman dan dapat terdata ke dalam DTKS Kelurahan Minasatene.

2) Tujuan Khusus

- a) Adanya kesadaran terhadap pentingnya terdaftar DTKS bagi masyarakat kurang mampu
- b) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kelurahan Minasatene terhadap DTKS
- c) Memberikan pemahaman bagaimana mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam DTKS

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada masyarakat Kelurahan Minasatene sebagai peserta yang belum terdaftar dalam DTKS, yakni melalui program “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Informasi DTKS” yang didalamnya terdapat kegiatan sebagai berikut :

1) Sosialisasi terkait DTKS

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Adapun tujuan dalam kegiatan ini agar masyarakat tidak lagi bingung terkait DTKS dan menambah ilmu serta wawasan mereka terkait program dari pemerintah.

2) Pendaftaran ke dalam DTKS bagi masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan

Proses pelaksanaan dalam pendaftaran DTKS akan melibatkan pegawai kelurahan yang berwenang dalam hal ini yang juga akan dibantu oleh Pendamping PKH dan Pendamping TKSK yang akan mengecek langsung ke masyarakat terkait yang akan didaftarkan kepesertaannya di dalam DTKS Kelurahan Minasatene.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sistem Partisipan

No.	Jenis sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2.	<i>Change Agent System</i>	Pekerja sosial

3.	<i>Client System</i>	Masyarakat bukan penerima PKH (DTKS)
4.	<i>Support System</i>	1. Kepala kantor Kelurahan Minasatene 2. Pegawai kantor Kelurahan Minasatene 3. Pendamping PKH 4. Pendamping TKSK
5.	<i>Controlling System</i>	Kantor Kelurahan Minasatene
6.	<i>Implementing System</i>	1. Kepala kantor Kelurahan Minasatene 2. Pegawai kantor Kelurahan Minasatene 3. Pendamping PKH 4. Pendamping TKSK 5. Pekerja Sosial
7.	<i>Target System</i>	Masyarakat bukan penerima PKH (DTKS)
8.	<i>Action System</i>	1. Pegawai kantor Kelurahan Minasatene 2. Pendamping PKH 3. Pendamping TKSK 4. Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada di Kelurahan Minasatene adalah Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*). pengembangan masyarakat adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau bidang kegiatan tertentu.

Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1) Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipan secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan kegiatan nanti penyuluhan sosial dirasa mampu untuk

dapat menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat.

2) *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* atau yang disingkat dengan FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal dan cukup banyak dipakai oleh beberapa orang, kelompok. Organisasi dan lain-lain yang merupakan sebuah diskusi terarah dan berfokus membahas masalah tertentu. Tujuan FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan/responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan.

3) *Monitoring* dan Evaluasi

*Monitoring* merupakan serangkaian pemantauan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Program sosialisasi dapat terlaksana dengan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK	2 Paket	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00
2	<i>Sound system</i>	1 unit	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
3	<i>Banner kegiatan</i>	1 lembar	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00
4	Infokus dan proyektor	1 unit	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00
5	Honor narasumber	2 (orang/jam)	Rp. 1.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
6	Konsumsi	50 <i>box</i>	Rp. 15.000,00	Rp. 750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 3.375.000,00</b>

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 2.3 Analisis SWOT

<b><i>Factor internal</i></b>       <b><i>Factor external</i></b>	<p style="text-align: center;"><b><i>Strength :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya narasumber yang berkompeten</li> <li>2. Kegiatan didukung oleh Kelurahan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Weakness :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan masyarakat tidak memahami materi diskusi</li> <li>2. Belum menyeluruhnya sasaran program sosialisasi</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><i>Opportunities :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambah wawasan masyarakat</li> <li>2. Menjalin komunikasi antara Kelurahan dan masyarakat dalam sebuah forum</li> <li>3. Mendaftarkan masyarakat yang layak masuk ke DTKS</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Strategi SO :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Kerjasama antara masyarakat dengan Kelurahan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Strategi WO :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian sosialisasi yang menarik</li> <li>2. Menggunakan komunikasi dua arah</li> <li>3. Mencari lokasi yang mudah diakses masyarakat</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><i>Threats :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat tidak hadir tepat waktu</li> <li>2. Masyarakat yang tidak hadir di lokasi</li> <li>3. Cuaca yang tidak mendukung pada saat pelaksanaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Strategi ST :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyuruh pegawai kelurahan mendaftarkan masyarakat ke DTKS</li> <li>2. Menstimulasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b><i>Strategi WT :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang DTKS melalui sosialisasi</li> <li>2. Membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Kelurahan</li> </ol>

h. Jadwal dan Langkah-langkah

a) Jadwal Kegiatan

Berikut merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan program :

Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	09.00-09.30	Pembukaan	Seksi Acara	Pembukaan oleh Kepala Kantor Kelurahan Minasatene
2	09.30-11.00	Sosialisasi dari pegawai Kelurahan	Seksi Acara	Materi : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
3	11.00-12.00	FGD	Seksi Acara	Moderator : Pekerja Sosial
4	12.00-14.00	Ishoma	Seksi Konsumsi	Istirahat, sholat zuhur, dan makan siang
5	14.00-14.15	<i>Ice breaking</i>	Seksi Acara	praktikan
6	14.15-14.40	Mendaftarkan ke DTKS	Seksi Acara	Akan dilist nama masyarakat yang berhak masuk DTKS
7	14.40-14.50	Penutup	Seksi Acara	Foto bersama

2) Langkah-langkah Pelaksanaan

a) Pra Pelaksanaan

- (1) Praktikan akan mengundang pegawai Kelurahan Minasatene yang akan menjadi narasumber
- (2) Praktikan akan mengundang pendamping PKH, pendamping TKSK, Pekerja Sosial
- (3) Praktikan akan mengundang masyarakat rentan dan miskin perwakilan RT/RW yang ada di Kelurahan Minasatene

b) Pelaksanaan

- (1) Sambutan oleh Kepala Kantor Lurah Minasatene
- (2) Sosialisasi dari pegawai bagian DTKS
- (3) FGD



- (4) *Ice breaking*
- (5) Cara mendaftarkan diri masuk ke dalam sistem DTKS oleh admin kelurahan
- (6) Penutup
- c) Pasca Pelaksanaan
  - (1) Penyusunan laporan
  - (2) Dokumentasi kegiatan
  - (3) *Monitoring* dan evaluasi

## C. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

### 1. Gambaran Umum Masalah

Semua orang pasti ingin memiliki rumah yang layak untuk dihuni, begitupun dengan masyarakat miskin dan rentan, tetapi pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Faktor ekonomi bahkan menjadi salah satu penyebabnya, dimana penghasilan masyarakat yang tidak sebanding dengan harga bahan dan perbaikan rumah yang layak untuk ditinggali. Hal ini pun memaksa Sebagian besar dari mereka mencari atau bahkan membangun rumah tidak layak huni sebagai tempat tinggal masyarakat yang kurang mampu.

Merespon masalah ini, pihak Kodim 1421 Pangkep bersama Baznas Kabupaten Pangkep mengadakan suatu kegiatan kemanusiaan yaitu Karya Bakti Penyerahan Manfaat Bedah Rumah tidak layak huni menjadi layak huni pada lima rumah yang ada di Kelurahan Minasatene menggunakan dana zakat yang dihimpun oleh Baznas Kabupaten Pangkep.

Kegiatan ini berlokasi di Kelurahan Minasatene, Kecamatan Minasatene yang dihadiri oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan, H. Muhammad Yusran Lalogau, Komandan Kodim 1421 Pangkep Letkol Inf Hengky Vantriardo, Kakandep Kemenag Kabupaten Pangkep H. Muhammad Nur Halik, Ketua Baznas Kabupaten Pangkep, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep dan *stakeholder* lainnya.

Dengan adanya bantuan program yang digiatkan guna membantu pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam membantu meringankan beban masalah yang dihadapi oleh masyarakat Pangkep terkhususnya rumah tidak layak huni. Namun yang terjadi di Kelurahan Minasatene itu tidak meratanya sasaran program Rutilahu.

### 2. Tinjauan Konsep

#### a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial atau juga tidak berfungsinya dengan baik keberfungsian sosial mereka. Bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat merupakan barang, jasa, uang tunai dan lain-lain. Ketentuan mengenai bantuan sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial.

Bantuan sosial menurut Permensos Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

b. Tujuan Dana Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/pmk.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- 2) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal
- 3) Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi masyarakat negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- 4) Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- 5) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan
- 6) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

c. Dasar Hukum Bantuan Sosial

Dasar Hukum Bantuan Sosial meliputi :

- 1) UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

- 2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  - 3) PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial
  - 4) Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
  - 5) Keputusan Menteri Sosial RI No. 1/huk/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana
  - 6) Keputusan Menteri Sosial RI No. 56/huk/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dari Masyarakat
- d. Bentuk-Bentuk Bantuan Sosial
- Pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial diterangkan bahwa terdapat tiga bentuk bantuan sosial, yaitu:
- 1) langsung dapat berupa uang tunai maupun barang dalam makanan pokok, pakaian, atau tempat tinggal (rumah penampungan sementara).
  - 2) Penyediaan aksesibilitas dapat berupa pengadaan akses pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
  - 3) Penguatan kelembagaan dapat berupa bimbingan teknis atau supervisi.
- e. Sumber Dana Bantuan Sosial
- Berikut beberapa sumber dana untuk bantuan sosial yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial:
- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - 3) Sumbangan masyarakat.
  - 4) Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  - 5) Bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangundangan.
  - 6) Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Secara singkat, sumber dana bantuan sosial dapat diperoleh melalui:
- 1) Masyarakat dari kedermawanan orang, lembaga sosial, dan dana atas dasar kearifan lokal.
  - 2) Hibah pihak swasta dan/atau luar negeri.
  - 3) Pemerintah negara.
- f. Tentang Baznas
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan

Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dalam mengelola zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan

g. Pengertian Rumah Layak Huni

Setiap manusia dimanapun berada membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut rumah. Kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal sangat dirasakan setiap manusia karena perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak dipenuhi. Rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepas lelah, tempat bergaul dan membina rasa kekeluargaan diantara anggota keluarga, tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan status lambang sosial (Mukono dalam Keman, 2005:30).

Menurut peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa: Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni meliputi:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balak (Beam), struktur atas.
- 2) Menjamin Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.

- 3) Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12 m<sup>2</sup>/orang

Kelayakan suatu hunian menurut UU *Universal Declaration of Human Rights* dalam UNESCAP (2008) adalah :

- 1) Pelayanan dasar dan infrastruktur: Sebuah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan, kenyamanan dan dukungan seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.
- 2) Keterjangkauan: biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhinya.
- 3) Dapat ditinggali: sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman terhadap keselamatan lainnya, serta uang yang berkecukupan bagi penghuninya.
- 4) Aksesibilitas: setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memprioritaskan hak mereka dalam mengalokasikan lahan ataupun perencanaan penggunaan lahan.
- 5) Lokasi: sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan di desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.
- 6) Mencerminkan budaya: dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin didalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas modern utama dalam kepemilikan rumah layak huni adalah kemiskinan, sehingga dengan keterbatasan ekonomi itu semakin banyak orang-orang yang menghuni rumah yang tidak layak.

Agar fungsi rumah sebagai pusat pembinaan keluarga bisa tercapai, setiap orang harus menepati rumah yang layak huni. Hunian yang layak harus mampu menopang aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Pandangan masyarakat tentang rumah layak huni berbeda-beda. Acuan layak suatu hunian biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan. Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan hasil dari suatu proses keputusan yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kemampuan baik secara ekonomi, sosial dan fisik. Rumah harus

memenuhi syarat dekat dengan tempat kerja atau beralokasi di tempat yang berpeluang dalam mendapatkan pekerjaan. MBR tidak terlalu mementingkan kualitas fisik rumah asalkan tetap menjamin kelangsungan hidupnya, dan juga tidak memandang pentingnya hak-hak penguasaan atas tanah dan bangunan karena rumah di anggap suatu fasilitas (Josantoso,et.al,dalam Tobing dan Agustinus, 2012:18).

h. Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)

RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- 1) Kualitas konstruksi bangunan dengan bahan beton bertulang memenuhi SNI
- 2) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan kayu memenuhi SNI

- 3) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja memenuhi SNI
  - 4) Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan selain hal tersebut diatas minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter (rata-rata gempa yang terjadi di Indonesia antara 6 – 7 skala *richter*).
  - 5) Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9 m<sup>2</sup>/org) dalam pasal 22 ayat (3) UU 1 Tahun 2011.
- i. Syarat Bantuan Bedah Rumah
- 1) WNI dan sudah berkeluarga
  - 2) Memiliki atau menguasai tanah dengan dasar hukum yang sah dan bukan tanah sengketa
  - 3) Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi yang tak layak huni
  - 4) Tempat tinggal sekarang merupakan satu-satunya rumah milik pendaftar
  - 5) Sebelumnya belum pernah mendapat bantuan pemerintah untuk perumahan
  - 6) Penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP)
  - 7) Bersedia berswadaya dan membentuk KPB
- j. Pembentukan KPB sendiri harus memenuhi syarat berikut:
- 1) Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota
  - 2) Anggota kelompok maksimal 20 orang
  - 3) Anggota berdomisili di desa atau kelurahan yang sama
  - 4) Kepala desa atau lurah akan membentuk dan menetapkan kelompok
- k. Cara Daftar Program Bantuan Bedah Rumah
- Setelah memenuhi seluruh syarat dan kriteria, ikuti cara daftar bedah rumah berikut ini:
- 1) Mengajukan permohonan ke Kepala Desa, nantinya Bupati akan mengkoordinir proses pendataan.
  - 2) Jumlah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa atau kelurahan akan didata secara keseluruhan.
  - 3) Tiap desa atau kelurahan akan mengusulkan minimal 20 unit hunian tak layak huni.
  - 4) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menetapkan calon penerima.
  - 5) KPA atau Kepala Satker akan mengesahkan calon penerima dan berubah jadi penerima bantuan bedah rumah.
  - 6) Dana bantuan akan dicairkan melalui bank atau pos penyalur.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

##### 1) Penyebab Masalah

- a) Kecemburuan Sosial Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Adanya program bantuan sosial Karya Bakti Penyerahan Manfaat Bedah Rumah tidak layak huni menjadi layak huni di salah satu rumah yang ada di Kelurahan Minasatene membuat keluarga penerima manfaat yang merupakan saudara iparnya sendiri merasa cemburu lantaran ia tidak diberikan bantuan yang sama dengan saudara iparnya. Dengan adanya kejadian ini membuat hubungan sosial diantara kedua orang ini akhirnya tidak baik lagi.

- b) Masyarakat yang Tidak Mengerti Kriteria Sasaran Penerima Manfaat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

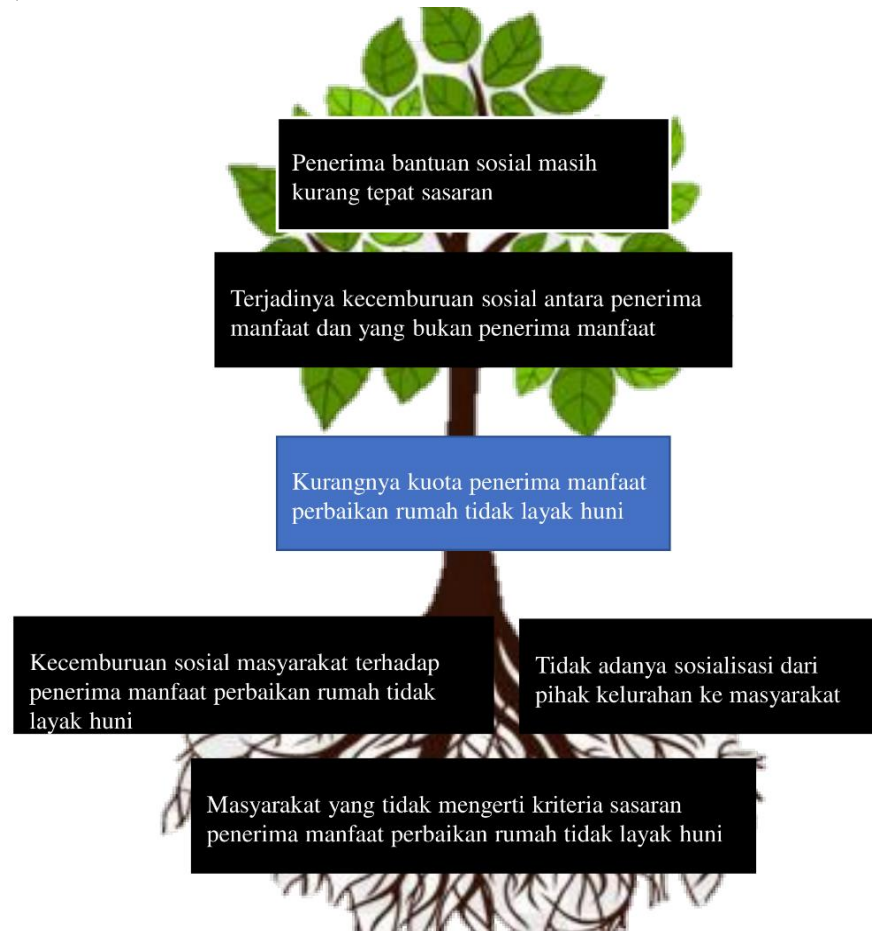
Sebelum diberikan bantuan sosial bedah rumah tidak layak huni menjadi layak huni pastinya telah dilakukan pendataan dan pengecekan langsung ke rumah masyarakat yang akan dijadikan sasaran bantuan pelaksanaan program. Namun tidak sedikit masyarakat masyarakat yang kurang paham dengan adanya kriteria calon penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni ini menjadikan miskomunikasi dan kesalahpahaman yang akan akhirnya terjadi di lingkungan masyarakat

- c) Terbatasnya kuota penerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni

Terbatasnya kuota penerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni dari Karya Bakti Penyerahan Manfaat Bedah Rumah tidak layak huni menjadi layak huni .



## 2) Analisis Pohon Masalah



Gambar 2.2 Analisis Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial

## 3) Dampak Masalah

Dari hasil Analisis Pohon Masalah, maka dapat disimpulkan beberapa dampak masalahnya sebagai berikut :

- Terjadinya kecemburuan sosial antara penerima dan yang bukan penerima manfaat

Dengan sedikitnya kuota penerima manfaat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat yang merasa dirinya berhak untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah juga.

- Penerima bantuan sosial masih kurang tepat sasaran

Dengan sedikitnya kuota penerima manfaat bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini menimbulkan beberapa oknum yang mendata calon penerima bantuan perbaikan rumah dengan orang yang mereka kenal terlebih dahulu selain dari kondisi rumah yang memang sudah tidak layak huni.

## 4) Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu “Kurangnya Kuota Penerima

Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni oleh Kodim 1421 yang bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Pangkep di Kelurahan Minasatene”

b. Identifikasi kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

- 1) Memberikan pemahaman terhadap kedua masyarakat yang berselisih mengenai kriteria penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni
- 2) Mendamaikan kedua masyarakat yang berselisih
- 3) Meningkatkan pemahaman kepada salah satu masyarakat bahwasanya semua orang telah diatur rejekinya masing-masing

c. Potensi dan sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1) Babinsa (Bintara Pembina Desa)

Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan satuan tugas TNI AD di tingkat koramil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

2) Ketua RT dan Ketua RW

Sebagai wadah partisipan masyarakat yang bermitra dengan pemerintah desa. Yang juga mempunyai tugas dalam perencanaan, pengawasan pembangunan beserta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

3) Pekerja Sosial

Pekerja Sosial bertindak sebagai *mediator* dan *broker* diantara masyarakat dengan masyarakat lainnya juga *stakeholder* lainnya.

#### 4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Dengan adanya bantuan sosial seperti yang dilaksanakan pihak Kodim 1421 Pangkep bersama Baznas Kabupaten Pangkep yakni suatu kegiatan kemanusiaan Karya Bakti Penyerahan Manfaat Bedah Rumah tidak layak huni menjadi layak huni harusnya memberikan dampak positif bagi banyak masyarakat yang membeikan arti bahwa berbagai pihak turut andil dalam upaya mensejahterakan masyarakat, walaupun belum menyeluruh.

Pemberian dan peningkatan pemahaman kepada pegawai Baznas dan Babinsa TNI di Kelurahan Minsatene dalam menjalankan program Karya Bakti Penyerahan Manfaat Bedah Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dirasa perlu untuk diadakan mengingat masih banyaknya persyaratan sebelumnya yang perlu dikaji ulang demi

adilnya pemerataan pemberian bantuan.

Pendataan langsung ke lokasi masyarakat dengan *transect walk* akan lebih menyentuh masyarakat dikarenakan melihat langsung kondisi rumah yang sekiranya layak mendapatkan atau tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

b. Tujuan umum dan tujuan khusus

Program yang akan dilaksanakan terdiri dari dua tujuan yaitu :

1) Tujuan umum

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan Kerjasama dengan Baznas Kabupaten Pangkep dan Kodim 1421 dalam pendataan penerima bantuan

2) Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari program ini yaitu :

- a) Memberikan pemahaman kepada setiap penyelenggara bantuan sosial terkait syarat-syarat penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
- b) Membantu penyelenggara dalam proses pendataan di lapangan
- c) Memberikan hak masyarakat yang layak untuk diberikan bantuan perbaikan rumah

c. Bentuk kegiatan dan program

Dalam rencana pemecahan ini akan berfokus pada peningkatan pemahaman penyelenggara bantuan, yakni melalui “Program Bina Baznas dan Kodim 1421 Pangkep” yang didalamnya terdapat kegiatan sebagai berikut :

1) Bincang Bahas Masyarakat (BBM)

Di dalam kegiatan ini akan dilakukan diskusi dalam bentuk *Focus Group Discussion* untuk membahas terkait syarat-syarat penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni serta penentuan-penentuan keluarga yang akan menjadi calon penerima bantuan rumah tidak layak huni.

2) Pendataan langsung ke rumah masyarakat

Dengan turun langsungnya ke rumah masyarakat untuk mendata yang dilakukan oleh pekerja sosial, petugas Baznas, anggota Kodim 1421 maka data yang diperoleh akan lebih *real* karena menyaksikan langsung kondisi rumah masyarakat yang memang layak untuk didata sebagai calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

d. Sistem Partisipan

Tabel 2.5 Sistem Partisipasi

No.	Jenis sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2.	<i>Change Agent System</i>	1. Pekerja sosial 2. Pendamping TKSK
3.	<i>Client System</i>	1. Babinsa TNI Kelurahan Minasatene 2. Pegawai Baznas Pangkep
4.	<i>Support System</i>	1. Baznas Kabupaten Pangkep 2. Kodim 1421 Kabupaten Pangkep
5.	<i>Controlling System</i>	Kantor Kelurahan Minasatene
6.	<i>Implementing System</i>	1. Pekerja Sosial 2. Babinsa TNI Kelurahan Minasatene 3. Pegawai Baznas Pangkep
7.	<i>Target System</i>	1. Babinsa TNI Kelurahan Minasatene 2. Pegawai Baznas Pangkep
8.	<i>Action System</i>	1. Pekerja Sosial 2. Pendamping TKSK 3. Babinsa TNI Kelurahan Minasatene 4. Pegawai Baznas Pangkep

e. Metode dan Teknik

Dalam kegiatan metode yang akan digunakan ialah metode *Community Organization and Community Development* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sedangkan untuk teknik yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan terdapat beberapa teknik, sebagai berikut:

a) *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* atau yang disingkat dengan FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal dan cukup banyak dipakai oleh beberapa orang, kelompok. Organisasi dan lain-lain yang merupakan sebuah diskusi terarah dan berfokus membahas masalah tertentu. Tujuan FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan/responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan.

b) *Transect Walk*

*Transect Walk* merupakan metode untuk mengasesmen

masyarakat dan melakukan penelusuran ke masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang ada di masyarakat. Ada dua poin yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu melakukan pemetaan dan pendampingan oleh pihak lokal. Dimana dalam melakukan *transect walk* perlu adanya pihak lokal untuk mendampingi kita dalam melakukan asesmen atau pihak lokal ini sebagai *key person* yang dipercaya masyarakat, yang mengerti keadaan masyarakat setempat dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut, dan juga pihak lokal ini pun dapat membantu untuk melakukan pemetaan.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang dibutuhkan

Tabel 2.6 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK	2 Paket	100.000,00	200.000,00
2	Sound system	1 unit	150.000,00	150.000,00
3	Banner kegiatan	1 lembar	75.000,00	75.000,00
4	Infokus dan proyek	1 unit	200.000,00	200.000,00
5	Honor narasumber	2 (orang/jam)	1.000.000,00	2.000.000,00
6	Konsumsi	50 box	15.000,00	750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.375.000,00</b>

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 2.7 Analisis SWOT

<i>Factor internal</i>	<b>Strength :</b> 1. Adanya pengawasan dari Babinsa 2. Proses didampingi pekerja sosial dan pendamping TKSK	<b>Weakness :</b> 1. waktu yang tidak cukup 2. banyak rumah yang harus dikunjungi
<i>Factor eksternal</i>	<b>Strategi SO :</b> 1. Melakukan kerja sama antara pekerja sosial dan babinsa dalam membangun komunikasi dengan masyarakat	<b>Strategi WO :</b> 1. Proses <i>transect walk</i> yang berjalan dengan baik 2. Menggunakan komunikasi dua
<b>Opportunities :</b> 1. Terjalannya Kerjasama yang baik 2. Menjalin komunikasi dengan masyarakat		

	2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	arah 3. Mengidentifikasi lokasi
<b>Threats :</b> 1. Ada banyak warga yang ingin didata 2. Tidak tepat waktunya proses <i>transect walk</i> hingga memperlambat kegiatan	<b>Strategi ST :</b> 1. pekerja sosial Bersama pendamping TKSK memetakan lokasi yang perlu dikunjungi 2. bekerjasamanya Babinsa dan pegawai Baznas	<b>Strategi WT :</b> 1. Meningkatkan pemahaman Babinsa dan Pegawai Baznas dalam menentukan peserta penerima bantuan

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal Kegiatan

Berikut ini rancangan pelaksanaan kegiatan program :

Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Kegiatan	Sasaran	Fasilitator	Waktu
1	Bincang-bincang Asik	FGD Bersama pekerja sosial, pendamping TKSK, Babinsa dan Pegawai Baznas	Babinsa TNI Kelurahan Minasatene dan Pegawai Baznas Kabupaten Pangkep	Pekerja Sosial	1 Hari
2	Pendataan Calon Penerima Bantuan	<i>Transect Walk</i> di Kelurahan Minasatene untuk mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan bedah rumah	Masyarakat Kelurahan Minasatene	Pekerja Sosial dan Pendamping TKSK	3 Hari

2) Langkah-langkah

a) Pra Pelaksanaan

- (1) Praktikan akan mengundang pegawai Baznas dan Babinsa TNI di Kelurahan Minasatene untuk membicarakan program
- (2) Praktikan akan mengundang pendamping TKSK dan Pekerja Sosial untuk membicarakan program
- (3) Praktikan akan membuat pemetaan lokasi yang akan didatangi

bersama dengan pegawai Baznas, Babinsa TNI, Pendamping TKSK dan pekerja Sosial.

b) Pelaksanaan

- (1) FGD Bersama dengan pegawai Baznas, Babinsa TNI, Pendamping TKSK, dan Pendamping Sosial
- (2) Melakukan *Transect Walk*
- (3) Mendata calon penerima bantuan rutilahu

c) Pasca Pelaksanaan

- (1) Penyusunan laporan
- (2) Dokumentasi kegiatan
- (3) *Monitoring* dan evaluasi

## D. Profil Pemberdayaan Sosial

### 1. Gambaran Umum Masalah

Garis kemiskinan di Indonesia menduduki angka yang tinggi dan menyebar di seluruh provinsi. Kondisi tersebut kemudian mendorong pemerintah menginisiasi Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha. Program yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga menerapkan pendekatan kolaborasi *top down* dan *bottom up* pada pelaksanaannya.

Melalui KUBE, masyarakat miskin mendapatkan fasilitas untuk digunakan dalam usaha bukan bantuan yang digunakan sekali habis, dengan kata lain KUBE merupakan program investasi jangka Panjang. Melalui KUBE masyarakat miskin yang dapat saling membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Seperti yang terlihat pada saat ini, sudah banyak dari program KUBE yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dengan berbagai jenis usaha yang mereka jalankan pula. Dan banyak juga KUBE yang berhasil memenuhi kriteria KUBE berkembang serta berkelanjutan dan mampu untuk meraup keuntungan.

Namun dibalik kabar KUBE yang sudah banyak tersebar di Indonesia, tidak sedikit diantaranya mengalami masalah dan tidak berhasil mencapai tujuan program. Beberapa faktor ketidakberhasilan itu kemudian tidak terlepas dari masalah internal KUBE, seperti masalah struktur organisasi kelompok, keanggotaan kelompok, komitmen kelompok, manajemen kelompok, dan capaian-capaian lain dalam kelompok. Terlihat jelas adanya ketimpangan dalam hal ini, dimana anggota masyarakat diupayakan untuk terhimpun dalam suatu wadah kelompok KUBE tetapi kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di dalamnya masih sangat terbatas, seperti latar belakang Pendidikan rendah, pengalaman dalam berorganisasi yang minim, kemampuan berinteraksi dan

berkomunikasi yang kurang dan lain-lain masih sangat terbatas. Tentu hal itu pula menjadi suatu problematika yang sangat fatal dalam sebuah kelompok.

Adanya permasalahan yang diuraikan di atas menyebabkan banyak KUBE yang sudah berjalan kemudian menjadi vakum dan bahkan berhenti dipertengahan jalan diakrenakan sudah banyak masalah yang tidak bisa lagi untuk dikelola dan dicari jalan keluarnya. Sama halnya dengan KUBE Katrisala yang ada di Kelurahan Minasatene yang akhirnya tidak berlanjut lagi padahal masih ada peralatan-peralatan yang dapat menunjang keberlanjutan KUBE jika dipergunakan kembali. Anggota kelompok KUBE Katrisala dan usaha yang dijalankan kemudian menjadi dampak dari gagalnya KUBE yang bermasalah.

## 2. Tinjauan Konsep

### a. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) adalah kelompok keluarga miskin dan rentan yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Permensos 2 Tahun 2019) yang beranggotakan lima sampai dua puluh kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk kedalam DTKS.

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) juga merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal usaha. Program yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga menerapkan pendekatan kolaborasi *top down* dan *bottom up* pada pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan KUBE di lapangan itu tidak berjalan secara mandiri, tetapi didampingi oleh peran pendamping KUBE yang akan memonitor berjalannya KUBE mulai dari perintisan awal hingga seterusnya.

### b. Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara dalam kelompok
- 2) Peningkatan pendapatan
- 3) Pengembangan usaha
- 4) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota dan dengan masyarakat sekitar

### c. Syarat Pembentukam dan Keanggotaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Syarat pembentukan dan keanggotaan KUBE adalah sebagai berikut :

- 1) Rumah Tangga Miskin yang Terdaftar dalam DTKS:



- 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK):
  - 3) Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) dan masih produktif:
  - 4) Belum pernah mendapat bantuan KUBE;
  - 5) Membentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap;
  - 6) Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.
- d. Tahapan Kelompok Usaha Bersama
- Adapun tahapan KUBE adalah sebagai berikut :
- 1) KUBE Penumbuhan : KUBE awal yang baru dibentuk
  - 2) KUBE Pengembangan (BLPS) : KUBE yang telah berhasil baik dalam pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), administrasi maupun kegiatan kelompok yang telah berjalan minimal 2 tahun
  - 3) KUBE Mandiri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) : KUBE lanjutan dari Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) yang dikembangkan melalui kegiatan Lembaga Keuangan Mikro.
- e. Tahapan Pengusulan Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama
- Tahapan yang dilalui dalam pengusulan bantuan sosial KUBE sebagai berikut :
- 1) Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa;
  - 2) Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM);
  - 3) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi;
  - 4) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
  - 5) Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima KUBE;
  - 6) Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
  - 7) Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KUBE.
- f. Hak Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Hak yang dimiliki oleh anggota KUBE adalah sebagai berikut :
- 1) Memilih/dipilih menjadi pengurus;
  - 2) Mengemukakan pendapat dan gagasan;

- 3) Mengelola usaha dan/atau kegiatan;
  - 4) Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
  - 5) Menerima keuntungan dari hasil usaha;
  - 6) Ikut merumuskan aturan/keepakatan kelompok; dan
  - 7) Menerima dana bantuan KUBE sebesar Rp 2.000.000 per KK.
- g. Kewajiban anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Kewajiban yang harus ditaati oleh anggota KUBE adalah sebagai berikut :
- 1) Mematuhi aturan/keepakatan kelompok;
  - 2) Menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok;
  - 3) Memanfaatkan bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
  - 4) Mengelola Bantuan Sosial UEP-KUBE secara kelompok;
  - 5) Mengelola iuran kesetiakawanan sosial; dan
  - 6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUBE
- h. Indikator keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Menurut Istiana Hermawati 2006: 24, menyebutkan beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut:
- 1) Secara umum keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan sosial keluarga yang ditandai oleh:
    - a) Meningkatnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia pangan, papan, sandang.
    - b) Meningkatnya dinamika sosial.
    - c) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.
  - 2) Secara khusus perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ditunjukkan oleh :
    - a) Berkembangnya kerjasama diantara sesama anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan antara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan masyarakat sekitar
    - b) Mantapnya usaha Kelompok Usaha Bersama KUBE
    - c) Berkembangnya usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
    - d) Meningkatnya pendapatan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
    - e) Tumbuh kembangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dalam bentuk pengumpulan dana iuran kesetiakawanan sosial
- i. Pendamping Sosial KUBE
- Pendamping KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pendamping Sosial KUBE adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat

meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.

j. Tujuan Pendamping Sosial KUBE

Tujuan umum pendampingan sosial adalah meningkatkan motivasi, kemampuan, dan peran para anggota Kube atau LKM-KUBE dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan para anggotanya (Edi Suharto, 2004:101). Pendamping diharapkan juga melakukan kontrol terhadap kegiatan anggota kelompok.

k. Tugas dan Fungsi Pendamping Sosial KUBE

Mengacu pada Permensos 2 Tahun 2019, Pendamping Sosial KUBE mempunyai tugas membantu :

- 1) Membentuk KUBE;
- 2) Memverifikasi calon penerima bantuan;
- 3) Menyiapkan calon penerima bantuan;
- 4) Menyiapkan rencana anggaran biaya;
- 5) Memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
- 6) Memberikan bimbingan motivasi sosial;
- 7) Mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
- 8) Memantau pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- 9) Membantu dalam penyusunan laporan kegiatan

### 3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

1) Penyebab Masalah

a) Internal SDM KUBE yang tidak berfungsi dengan baik

Di dalam pelaksanaan kepengurusan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam internal KUBE tidak berjalan dan berfungsi sebagai mana mestinya. Bahkan hampir di seluruh Indonesia banyak ketidakaktifan KUBE itu didasari karena tidak berfungsinya sistem kepengurusan dengan baik.

b) Kurang terjalinnya solidaritas antar anggota

Di dalam pelaksanaan KUBE, tentu partisipasi aktif dari setiap anggota sangat dibutuhkan demi berjalannya tujuan bersama di dalam kelompok. Namun yang terjadi di lapangan kerap kali permasalahan internal dari setiap anggota melibatkan konflik yang kemudian menghambat berjalannya kelompok. Ketidakkompakan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang membuat setiap anggota KUBE tidak memiliki dorongan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

c) Kualitas SDM yang rendah

Kualitas Sumber Daya Manusia menyangkut mutu dari tenaga kerja yang menyangkut kemampuan, baik berupa kemampuan fisik, kemampuan intelektual, maupun

kemampuan psikologis. Dalam pengembangan KUBE di Indonesia, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan agar dapat mengembangkan usaha yang telah dikelola. Namun, hal ini malah menjadi permasalahan dalam pelaksanaan KUBE di Indonesia yang menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan KUBE relatif sangat kurang dan berdampak usaha yang dilakukan dalam KUBE tersebut kurang bisa berkembang secara optimal.

d) Peran Pendamping KUBE yang tidak optimal

Pendamping KUBE memiliki tugas membantu membentuk KUBE, memverifikasi calon penerima bantuan, menyiapkan calon penerima bantuan, menyiapkan rencana anggaran biaya, memberikan bimbingan teknis kepada KUBE, memberikan bimbingan motivasi, mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE, memantau pelaksanaan kegiatan, dan membantu dalam penyusunan laporan.

Tetapi di dalam pelaksanaannya di lapangan, dari semua tugas tersebut Pendamping KUBE tidak menjalankannya dengan baik dan optimal sehingga berdampak bagi pelaksanaan KUBE yang tersendat di tengah jalan dan sampai menyebabkan KUBE tidak berjalan dengan maksimal.

e) Belum memiliki mitra bisnis

Mitra bisnis merupakan suatu bentuk kolaborasi yang strategis dalam menjalankan kewirausahaan antara bisnis dan organisasi *non profit* dimana risiko, sumber daya, dan keterampilan dibagi dalam program-program yang menguntungkan masing masing partner serta masyarakat. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri. Tetapi dalam pelaksanaan KUBE masih banyak sekali KUBE yang tidak memiliki mitra. Sehingga dalam pengembangan Program KUBE masih sering terhambat karena tidak memiliki relasi antara mitra yang menyebabkan sulitnya penjualan hasil produksi.

2) Dampak masalah

a) Tidak tercapainya tujuan KUBE

Jika dalam pelaksanaan KUBE memiliki beberapa hambatan yang tidak dapat diselesaikan, maka tujuan di bentuknya KUBE yaitu peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan

pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar.

b) Pengentasan kemiskinan tidak terwujud

Ketidakterfungsinya sebuah KUBE sangat berpengaruh kepada masyarakat ataupun anggota KUBE tersebut. Karena fungsi dan tujuan terbentuknya KUBE adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat atau keluarga binaan sosial. Pengentasan kemiskinan tentu saja tidak akan terwujud jika KUBE tersebut tidak aktif. Karena dapat dilihat dari fungsi terbentuknya KUBE tersebut.

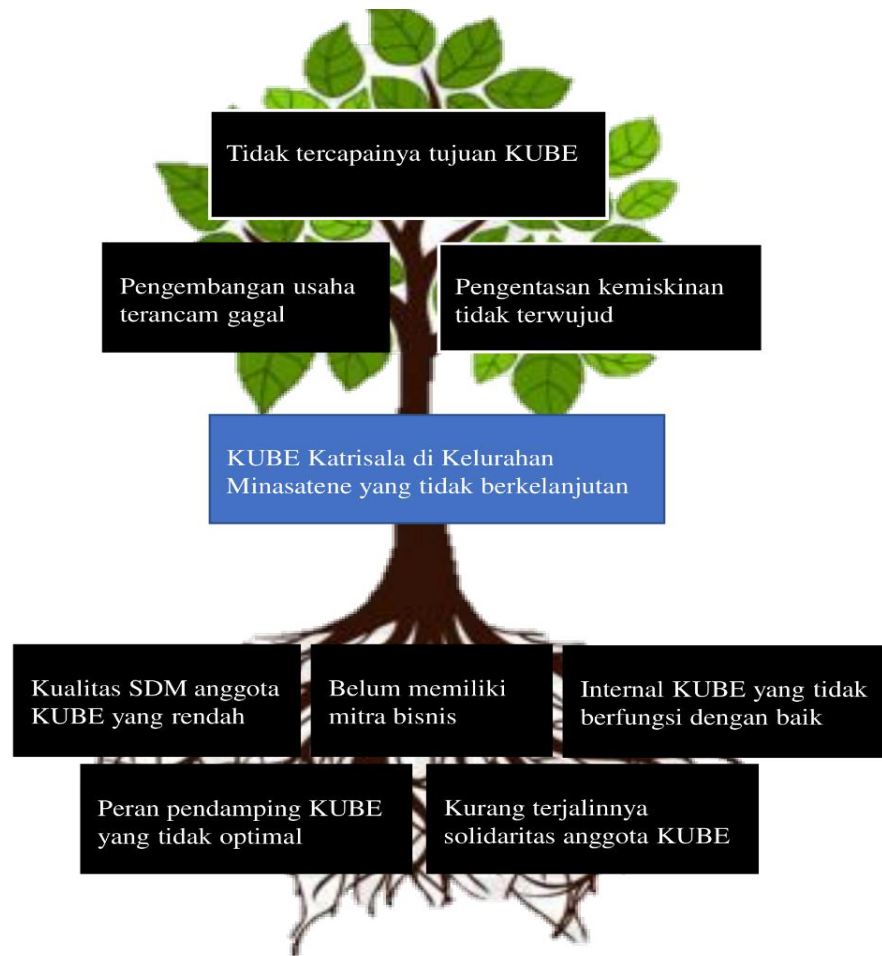
c) Pengembangan usaha terancam gagal

Pengembangan usaha adalah suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi dari pada kegiatan ekonomi dengan menggerakkan pikiran, tenaga dan badan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Rendahnya kapasitas anggota KUBE dapat mengancam pengembangan usaha. Hal ini disebabkan karena kemampuan anggota KUBE sangat berpengaruh pada Usaha yang sedang dijalankan. Jika dalam pelaksanaan pengembangan usaha, anggota KUBE tidak memiliki kemampuan yang baik dalam pengembangan usaha, maka dapat dipastikan pengembangan usaha tersebut tidak akan berjalan secara maksimal.

3) Fokus masalah

Dari penyebab masalah yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu “Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Katrisala di Kelurahan Minasatene Yang Tidak Berkelanjutan”.

#### 4) Analisis Pohon Masalah



Gambar 2.3 Analisis Pohon Masalah Profil Pemberdayaan Sosial

##### b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan analisis pohon masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya motivasi anggota KUBE
- 2) Memberikan edukasi dan pelatihan kepada anggota KUBE untuk dapat melakukan pengorganisasian kelompok dan pengelolaan keuangan
- 3) Membantu memperluas jaringan usaha melalui mitra bisnis

##### c. Identifikasi Potensi Dan Sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, TKSK berperan sebagai *motivator*, *dinamisator*, *innovator*, *evaluator*, *koordinator*, serta *administrator*. TKSK membantu kepada

kehidupan keluarga miskin dan rentan yang lebih baik dikarenakan TKSK membantu menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat secara langsung dan terkoordinasi.

2) Pekerja Sosial

Sebagai Pekerja Sosial, dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang dilaksanakan, Pekerja Sosial berperan sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, fasilitator, dan evaluator. Pekerja Sosial melakukan peran pendampingan langsung kepada anggota KUBE.

3) KUBE yang sudah berhasil

Dalam pelaksanaan kegiatan intervensi, KUBE yang sudah berhasil dalam menjalankan bisnis yang digeluti bersama anggota kelompoknya akan berperan sebagai motivator dalam pelaksanaan Seminar KUBE. Hal ini bertujuan agar menjadi motivasi terhadap KUBE lain yang sedang berkembang dan berkeinginan lebih untuk menjalankan program KUBE agar bisa mencapai tujuan KUBE.

4) Lembaga Wirausaha Sosial

Lembaga Wirausaha Sosial dalam rencana intervensi berperan sebagai *educator* bagi KUBE agar dapat melaksanakan pengembangan jaringan usaha menjadi lebih luas. Lembaga Wirausaha Sosial merupakan sekumpulan wirausaha yang ada di Indonesia dan dapat diakses. Lembaga ini beranggotakan orang-orang yang ahli dalam kewirausahaan, dan tentu saja akan dapat membantu pelaksanaan rencana intervensi.

#### 4. Rencana Intervensi

a. Tujuan Umum dan Khusus

1) Tujuan Umum

Program yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas yang dimiliki dari setiap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari program ini adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dalam KUBE

b) Meningkatkan jaringan usaha KUBE melalui mitra bisnis

c) Meningkatkan motivasi wirausaha dari setiap anggota KUBE

b. Bentuk kegiatan dan program

Dalam rencana pemecahan ini akan berfokus pada peningkatan kualitas SDM anggota KUBE, yakni melalui program “Seminar Kewirausahaan dan Strategi Pengorganisasian Kelompok” yang didalamnya ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

1) Seminar wirausaha dan strategi pengorganisasian kelompok

Seminar merupakan suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu permasalahan dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Dalam seminar yang diadakan ini, para anggota dan pengurus KUBE Bersama sama akan membahas tentang permasalahan yang ada di internal KUBE seperti lemahnya jaringan usaha KUBE dalam bermitra, lemahnya solidaritas diantara anggota beserta permasalahan-permasalahan internal yang ada dalam kelompok.

Kemudian, memecahkan bagaimana solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Didalam seminar tersebut juga akan diberikan penguatan-penguatan kepada anggota KUBE agar mau lebih berpartisipasi dan bekerja sama dalam pengembangan usaha KUBE yang pada intinya bagaimana membawa kelompok yang sudah terbentuk agar tetap berlanjut.

b) Pelatihan motivasi kerja

Pelatihan adalah cara untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian sebagai sebuah hasil dari pembelajaran mengenai kejuruan atau keahlian praktis dan pengetahuan yang berhubungan kepada kompetensi spesifik yang berguna.

Dalam program pelatihan ini, para anggota KUBE akan diberikan informasi dan edukasi guna untuk meningkatkan motivasi bekerja bagi setiap anggota KUBE dengan harapan setelah mendapatkan pelatihan dan seminar, para anggota KUBE mampu memotivasi diri sendiri untuk tidak mudah menyerah dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi pada internal dan eksternal KUBE tersebut. Dan diharapkan juga bekerja bukan semata-mata untuk meraih penghasilan saja, tetapi yang utama adalah memberikan manfaat dan selalu berinovasi dari produk yang mereka buat.

Pelatihan dalam KUBE bertujuan agar memperbaiki kinerja kelompok KUBE, memutakhirkan keahlian para anggota KUBE dengan kemajuan teknologi, membantu memecahkan masalah operasional, dan mampu mengelola dana KUBE. Sehingga para anggota KUBE dapat meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan dana dan pengorganisasian kelompok.



c. Sistem partisipan

Tabel 2.9 Sistem Partisipasi

No.	Jenis sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2.	<i>Change Agent System</i>	1. Pekerja sosial 2. TKSK
3.	<i>Client System</i>	Anggota KUBE
4.	<i>Support System</i>	1. Lembaga Kewirausahaan Sosial 2. KUBE yang berhasil
5.	<i>Controlling System</i>	Kepala Desa
6.	<i>Implementing System</i>	1. Pekerja sosial 2. TKSK
7.	<i>Target System</i>	Anggota KUBE
8.	<i>Action System</i>	1. Pekerja sosial 2. TKSK 3. Lembaga Kewirausahaan Sosial

d. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada di lapangan selama melakukan praktikum laboratorium adalah metode Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/Pengembangan Organisasi (*Community Oraganization/CD*). Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/Pengembangan Organisasi (*Community Oraganization/CD*) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1) Penyuluhan sosial

Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) *Community development* (Pengembangan Masyarakat)

*Community development* (Pengembangan Masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan

mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.

Proses yang ditunjukkan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Model ini berorientasi pada kemandirian, integrasi, dan kemampuan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai partisipan dalam proses pemecahan masalah dan pekerja sosial berperan membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

e. Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan

Tabel 2.10 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK	2 Paket	100.000,00	200.000,00
2	Sound system	1 unit	150.000,00	150.000,00
3	Banner kegiatan	1 lembar	75.000,00	75.000,00
4	Infokus dan proyektor	1 unit	200.000,00	200.000,00
5	Honor narasumber	2 (orang/jam)	1.000.000,00	2.000.000,00
6	Konsumsi	50 box	15.000,00	750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.375.000,00</b>

f. Analisis kelayakan program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 2.11 Analisis SWOT

<i>Factor internal</i>	<b>Strength :</b>	<b>Weakness :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya narasumber yang berkompeten</li> <li>2. Kegiatan didukung oleh pemerintah</li> <li>3. Adanya interaksi yang baik dari anggota KUBE</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan anggota KUBE tidak memahami materi</li> <li>2. Belum menyeluruhnya sasaran program sosialisasi</li> <li>3. Tidak adanya lokasi yang sesuai untuk melaksanakan program</li> </ol>
<i>Factor external</i>		

<p><b>Opportunities :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota KUBE berkembang</li> <li>2. KUBE berjalan secara efektif dan efisien</li> <li>3. Mitra bisnis KUBE yang meluas</li> </ol>	<p><b>Strategi SO :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Kerjasama antara anggota KUBE dengan mitra bisnis</li> <li>2. Memaksimalkan pendamping dan anggota KUBE</li> <li>3. Melakukan monitoring terhadap perkembangan KUBE</li> </ol>	<p><b>Strategi WO :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian sosialisasi yang menarik</li> <li>2. Menggunakan komunikasi dua arah</li> <li>3. Mencari lokasi yang mudah diakses masyarakat</li> </ol>
<p><b>Threats :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota KUBE tidak hadir tepat waktu</li> <li>2. Anggota KUBE yang tidak hadir di lokasi</li> <li>3. Anggota KUBE yang tidak berpartisipasi aktif</li> <li>4. Cuaca yang tidak mendukung pada saat pelaksanaan</li> </ol>	<p><b>Strategi ST :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menstimulasi anggota KUBE untuk aktif berpartisipasi</li> <li>2. Melakukan pendampingan dan <i>monitoring</i></li> </ol>	<p><b>Strategi WT :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman anggota KUBE tentang kewirausahaan dan pengorganisasian kelompok melalui seminar dan pelatihan</li> <li>2. Membangun komunikasi yang baik antar anggota KUBE</li> </ol>

g. Jadwal dan Langkah-langkah

1) Jadwal Kegiatan

Tabel 2.12 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	08.00-08.30	Pembukaan	Seksi Acara	Pembukaan oleh Kepala Kantor Kelurahan Minasatene

2	08.30-10.00	Seminar wirausaha dan strategi pengorganisasian kelompok	Seksi Acara	Materi : kewirausahaan dan strategi dalam pengorganisasian kelompok Pemateri : Lembaga Kewirausahaan Sosial
3	10.00-11.00	Pelatihan motivasi kerja	Seksi Acara	Materi : meningkatkan kualitas SDM dalam berbisnis Pemateri : perwakilan KUBE yang berhasil
4	11.00-12.00	Diskusi dan tanya jawab	Seksi Acara	Moderator : Praktikan
5	12.00-12.30	Ishoma	Seksi Konsumsi	Istirahat, sholat zuhur, dan makan siang
6	12.30-12.45	Penutup	Seksi Acara	Foto bersama

## 2) Langkah-langkah

### a) Pra Pelaksanaan

- (1) Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, praktikan mengundang Kepala Kantor Kelurahan Minasatene, Anggota KUBE, dan KUBE yang berhasil
- (2) Seminar ini juga mengundang beberapa *stakeholder* diantaranya TKSK dan Pekerja Sosial
- (3) Materi yang akan dibawakan adalah Kewirausahaan Dan Strategi Dalam Pengorganisasian Kelompok Dan Meningkatkan Kualitas SDM dalam berbisnis
- (4) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berlangsungnya pelatihan adalah aula kantor Kelurahan Minasatene

### b) Pelaksanaan

- (1) Sambutan oleh kepala Kelurahan Minasatene sekaligus membuka acara
- (2) Pembacaan doa oleh pekerja sosial
- (3) Seminar tentang kewirausahaan dan strategi pengorganisasian kelompok
- (4) Pelatihan motivasi kerja
- (5) Diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori praktikan
- (6) Ishoma
- (7) Penutup yang dirangkaikan dengan foto Bersama

- c) Pasca Pelaksanaan
  - (1) Penyusuna laporan
  - (2) Dokumentasi kegiatan sebagai bukti

## **E. Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial**

### **1. Gambaran umum masalah**

Sampah sudah menjadi musuh bersama bagi negara-negara di dunia, terkhususnya di Indonesia. Di Kelurahan Minasatene sendiri dirasa perlu upaya bersama untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan yang masif, salah satunya adalah dimulai dari rumah dengan disediakan tempat sampah untuk memilah dan menampung sampah *organic* dan *non organic* rumah tangga.

Kehadiran tempat sampah di rumah-rumah sangat membantu dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan mampu menjaga lingkungan tetap sehat, asri dan bersih. Selain itu, sampah yang dipilah di tong-tong sampah memudahkan untuk proses pengelolaan sampah di tingkat akhir. Baik dengan proses insinerator, tempat pembuangan, atau penghancur sampah. Di beberapa tempat juga ada pelayanan daur ulang, dengan satu atau lebih tempat sampah yang dikhususkan untuk didaur ulang.

Tetapi di yang terjadi di lapangan, khususnya di sebagian rumah masyarakat di Kelurahan Minasatene belum memiliki tempat sampah yang akhirnya ada yang dibakar, ditumpuk ataupun dibiarkan berserakan begitu saja.

Padahal dengan adanya tempat sampah di rumah-rumah sangat diperlukan agar sampah dapat dipilah dan memudahkan petugas kebersihan mengangkut dan membuangnya ke TPA resmi yang telah disediakan pemerintah setempat. Juga tidak adanya tempat sampah membuat sampah plastik semakin menggunung. Karena sebagian besar masyarakat menggunakan plastik juga untuk menampung sampah yang telah dikumpulkan.

### **2. Tinjauan Konsep**

#### **a. Pengertian Sampah**

Pengertian Sampah Menurut Azwar (1990), sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaikbaiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Kodoatie (2003) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Suryani, 2014). Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau

proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atas volumenya memerlukan pengelolaan khusus (UU Nomor 18 Tahun 2008).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012), Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, terlihat bahwa sampah adalah materi/sisa bahan (baik oleh manusia maupun alam) yang tidak digunakan atau tidak mempunyai nilai, yang dapat membahayakan fungsi lingkungan.

b. Sumber-sumber sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut :

1) Sampah dari Pemukiman Penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya.

2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

3) Sampah dari sarana pelayanan

Sampah yang dimaksud di sini misalnya sampah dari tempat hiburan umum, pantai, mesjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

4) Sampah dari industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, sisa bahan bangunan.

#### 5) Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman (Siahaan, 2013).

#### c. Jenis-jenis Sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih (2008), berdasarkan asalnya sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

##### 1) Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting

##### 2) Sampah anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng (Siahaan, 2013).

#### d. Pengertian Tempat Sampah

Tempat sampah atau biasa disebut tong sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Beberapa tempat sampah memiliki penutup pada bagian atasnya untuk menghindari keluarnya bau yang dikeluarkan sampah. Kebanyakan harus dibuka secara manual, tetapi saat ini sudah banyak yang menggunakan pedal untuk memudahkan membuka tutup tempat sampah.

Tempat sampah dalam ruangan umumnya dilapisi kantong untuk memudahkan pembuangan sehingga tidak perlu memindahkan tempat sampah ketika sudah penuh, cukup dengan membawa kantong yang melapisi tempat sampah lalu menggantinya dengan yang baru. Hal ini

memudahkan pembuangan sampah.

Beberapa tempat umum seperti taman memiliki tempat sampah yang ditempatkan di sisi sepanjang jalan yang secara frekuentif dapat ditemukan di sisi sepanjang jalan. Hal ini untuk menghindari kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial.

e. Jenis-Jenis Tempat Sampah

Warna-warna pada tempat sampah terbagi menjadi 5 (lima), di antaranya biru, hijau, merah, kuning, abu-abu ini disesuaikan dengan hierarki pemanfaatannya. Ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur soal permasalahan sampah, contoh UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”, juga ada UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang “Pengelolaan Sampah”.

Berikut ini adalah pembagian jenis dan fungsi tempat sampah berdasarkan warnanya :

1) Warna hijau

Tempat sampah berwarna hijau, berisi sampah organik yang mudah terurai seperti sisa makanan, bahan baku, daun kering, dan kotoran hewan. Sampah organik harus diangkut dan dirawat secara teratur setiap beberapa hari.

Ini membuatnya lebih mudah untuk menumpuk dari waktu ke waktu, menciptakan bau yang tidak menyenangkan dan menarik lalat. Penghasil limbah organik terbesar saat ini adalah rumah tangga.

Limbah organik adalah limbah hasil dari sisa organisme hidup sehingga dapat dengan mudah terurai secara alami tanpa campur tangan manusia. Secara alami, makhluk hidup melakukan proses penguraian (dekomposisi).

Sisa-sisa organik dapat dikatakan sebagai limbah ramah lingkungan. Bahkan bahan-bahan tersebut dapat didaur ulang menjadi barang bermanfaat jika diolah dengan baik. Misalnya dijadikan pupuk atau hal-hal lain.

2) Warna kuning

Tempat sampah berwarna kuning, berisi limbah anorganik seperti kaleng, plastik, dan styrofoam. Sampah anorganik yang diolah dengan baik dapat menjadi produk daur ulang atau bahan kemasan lebih ramah lingkungan.

Plastik biasanya digunakan untuk kemasan produk. Plastik juga biasa digunakan pada perabot rumah tangga. Produk plastik di dunia memiliki beberapa keunggulan, antara lain tahan karat dan tahan lama.

Saat musim hujan, sering dijumpai sungai meluap dengan



plastik. Plastik termasuk dalam sampah anorganik, dan dikhawatirkan akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

3) Warna biru

Tempat sampah warna biru membantu menyimpan kertas bekas agar mudah didaur ulang. Kertas bekas biasanya diolah menjadi bubur kertas dan dicetak Kembali menjadi kertas siap pakai.

4) Warna abu-abu

Warna tempat sampah ini jarang terlihat di tempat umum. Padahal, fungsinya sangat penting untuk menampung sampah dan kotoran seperti poopok bayi bekas, pembalut bekas, bahkan permen karet.

Salah satu contoh adalah kotoran dan air seni kucing berbahaya jika terhirup terus menerus. Faktanya, kotoran kucing dirumah tidak dibersihkan secara teratur dapat menyebabkan penumpukan gas ammonia. Limbah sisa umumnya rentan terhadap bakteri dan tidak boleh dicampur dengan jenis limbah lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah wadah khusus untuk menampung limbah khusus kotoran agar tidak membahayakan.

5) Warna merah

Warna tempat sampah merah digunakan untuk membuang sampah berupa pecahan kaca, bahan kimia, komponen elektronik, bahan berbahaya dan zat beracun (B3). Limbah B3 memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat disepelekan.

Limbah B3 adalah singkatan dari Bahan Beracun dan Berbahaya. Dalam undang-undang PP No 101 Tahun 2014 didefinisikan sebagai sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan atau komponen berbahaya.

Limbah B3 sering dikatakan mengandung zat anorganik atau teratogenik berbahaya. Teratogen sendiri adalah zat berbahaya yang dikenal dapat menyebabkan perkembangan abnormal dalam janin manusia selama kehamilan.

Dalam dunia medis juga dijelaskan sebagai perkembangan sel selama kehamilan dapat merusak embrio karena terganggu zat berbahaya. Limbah B3 sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Namun karena ketidaktahuan, tanpa sadar banyak masyarakat memperlakukan limbah B3 sama seperti mengolah sisa-sisa buangan biasa. Efek jangka panjangnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia.

Prosedur ketat harus diikuti saat menangani limbah untuk menghindari cedera, kecelakaan, atau penyebaran bahan

berbahaya. Umumnya Anda akan menjumpai beberapa warna tempat sampah untuk memudahkan memilah sisa-sisa konsumsi.

### **3. Asesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

##### **1) Penyebab Masalah**

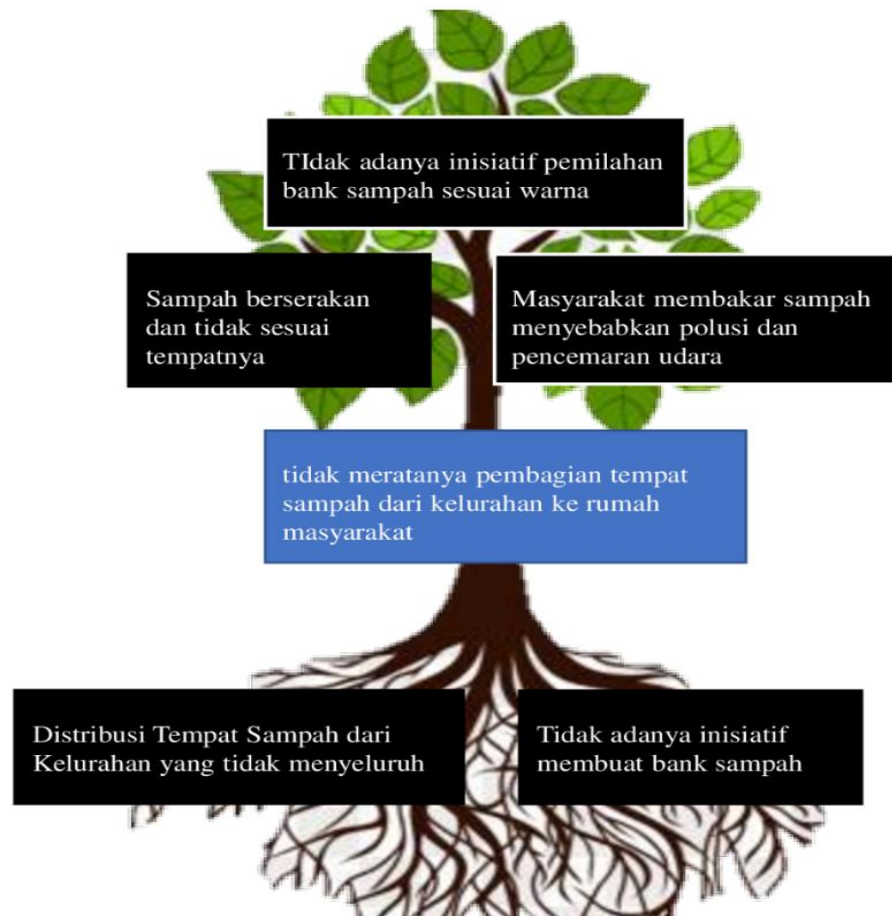
##### **a) Distribusi Tempat Sampah Dari Kelurahan**

Tempat sampah harusnya dimiliki oleh setiap rumah tangga yang ada dan bermukim dalam suatu wilayah, namun pada kenyataannya pembagian tempat sampah bagi rumah tangga yang diadakan oleh kelurahan nyatanya belum merata disetiap rumah. Hal ini kemudian terjadinya penumpukan sampah yang tidak pada tempatnya dan sebagiannya lagi berakhir dibakar oleh masyarakat.

##### **b) Tidak adanya inisiatif membuat pemilahan bank sampah sesuai warna**

Masyarakat tidak memiliki inisiatif Bersama untuk membuat tempat sampah yang bisa dipakai untuk memilah sampah sesuai warna yang telah diatur. Jadi sampah tidak lagi tertumpuk dan berserakan Ketika ada tempat sampah yang memang sesuai peruntukannya.

## 2) Analisis Pohon Masalah



Gambar 2.4 Analisis Pohon Masalah Profil Penataan Lingkungan Sosial

## 3) Dampak Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, maka dapat disimpulkan beberapa dampak masalahnya sebagai berikut :

### a) Sampah berserakan dan tidak sesuai tempatnya

Sampah rumah tangga yang dihasilkan banyak berserakan disekitaran halaman masyarakat yang akhirnya mengganggu pemandangan dan menimbulkan bau busuk yang tidak sedap.

### b) Masyarakat membakar sampah yang menyebabkan polusi dan pencemaran udara

Membakar sampah rumah tangga, plastik, dan kayu yang dicat berbahaya bagi lingkungan, karena bahan-bahan tersebut melepaskan bahan kimia beracun yang mencemari udara. Udara yang tercemar karena asap pembakaran sampah dapat dihirup oleh manusia dan hewan, disimpan di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan tanaman.

## 4) Fokus masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu “Tidak Meratanya Pembagian

Tempat Sampah dari Kelurahan ke Rumah Masyarakat”

b. Identifikasi kebutuhan

berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada adalah :

- 1) meningkatnya kesadaran kelurahan minasatene tentang pentingnya pengadaan tempat sampah bagi masyarakat
- 2) memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan berserakan
- 3) memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah karena dapat membuat polusi dan pencemaran udara

c. Identifikasi potensi dan sumber

Potensi dan sumber yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1) Kantor Kelurahan Minasatene

pemerintah dalam hal ini kantor kelurahan minasatene akan menjadi sector yang akan siap untuk mendistribusikan secara merata tempat sampah yang akan digunakan oleh masyarakat.

2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep

Dalam pelaksanaan Rencana Intervensi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep akan berperan sebagai pelaksana kebijakan urusan lingkungan hidup dan moneva lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

3) Tokoh Masyarakat

Sebagai Tokoh Masyarakat, dalam pelaksanaan Rencana Intervensi, Tokoh Masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Tokoh Masyarakat juga berperan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana agar program yang dilakukan berjalan dengan baik.

4) Karang Taruna

Sebagai Karang Taruna di suatu masyarakat, dalam pelaksanaan Rencana Intervensi, Karang Taruna dapat berperan sebagai tenaga pembantu pelaksana perubahan. Secara Bersama sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial.

#### 4. Rencana Intervensi

a. Tujuan umum dan khusus

Program yang akan dilaksanakan terdiri dari dua tujuan yaitu :

1) Tujuan umum

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya menjaga

lingkungan serta pemilahan sampah.

2) Tujuan khusus

- a) Mengubah pola perilaku masyarakat tentang membuang sampah
- b) Mengubah pola perilaku masyarakat yang membakar sampah
- c) Menyadarkan pemerintah kelurahan untuk pengadaan tempat sampah yang berbeda warna sesuai peruntukannya

b. Bentuk kegiatan dan program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada tidak meratanya pembagian tempat sampah di Kelurahan Minasatene, yakni melalui program “Minasatene Bersih dan Indah”, yang didalamnya terdapat kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut :

1) Sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dalam kegiatan ini tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah agar masyarakat di Kelurahan Minasatene dapat mengetahui tentang Kebersihan dan dampak dari lingkungan yang kotor. Harapan dari terlaksananya sosialisasi ini adalah agar masyarakat di Kelurahan Minasatene lebih mengetahui tentang pentingnya tidak membuang dan membakar sampah sembarangan serta menjaga Kebersihan Lingkungan.

2) Pengadaan tempat sampah berbeda warna sesuai fungsinya

Warna-warna pada tempat sampah terbagi menjadi lima, di antaranya Biru, Hijau, Merah, Kuning, Abu-abu ini disesuaikan dengan hieraki pemanfaatannya. Ada beberapa peraturan pemerintah yang mengatur soal permasalahan sampah, contoh UU no 23 tahun 1997 “Pengelolaan Lingkungan Hidup”, juga ada UU no 18 tahun 2008 tentang “pengelolaan sampah”.

c. Sistem partisipan

Sistem partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.13 Sistem Partisipasi

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2.	<i>Change Agent System</i>	1. Pekerja sosial 2. Karang taruna
3.	<i>Client System</i>	Masyarakat Kelurahan Minasatene
4.	<i>Support System</i>	1. Kantor Kelurahan Minasatene 2. DLH Kabupaten Pangkep

5.	<i>Controlling System</i>	Kantor Kelurahan Minasatene
6.	<i>Implementing System</i>	1. Pekerja sosial 2. Karang taruna 3. Tokoh masyarakat
7.	<i>Target System</i>	Masyarakat Kelurahan Minasatene
8.	<i>Action System</i>	1. Pekerja sosial 2. Kantor kelurahan minatene 3. DLH Kabupaten Pangkep 4. Karang taruna 5. Tokoh masyarakat

d. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/Pengembangan Organisasi (*Community Oraganization/CD*). Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/Pengembangan Organisasi (*Community Oraganization/CD*) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1) Penyuluhan sosial

Penyuluhan sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi masyarakat sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari masyarakat sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

2) *Monitoring* dan evaluasi

*Monitoring* adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. *Monitoring* dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi merupakan proses pengukuran akan efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil dari evaluasi selanjutnya akan digunakan sebagai analisis program selanjutnya

e. Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan

Tabel 2.14 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK	2 Paket	100.000,00	200.000,00
2	Sound system	1 unit	150.000,00	150.000,00
3	Banner kegiatan	1 lembar	75.000,00	75.000,00
4	Infokus dan proyektor	1 unit	200.000,00	200.000,00
5	Tempat sampah	200 unit	30.000,00	6.000.000,00
6	Honor narasumber	2 (orang/jam)	1.000.000,00	2.000.000,00
7	Konsumsi	50 box	15.000,00	750.000,00
	<b>Jumlah</b>			<b>9.375.000,00</b>

f. Analisis kelayakan program

Tabel 2.15 Tabel Analisis SWOT

<i>Factor internal</i>	<b>Strength :</b>	<b>Weakness :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya narasumber yang berkompeten</li> <li>2. Kegiatan didukung oleh pemerintah</li> <li>3. Adanya respon yang baik dari masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan anggota masyarakat masih tidak mau menjalankan program</li> <li>2. Belum menyeluruhnya sasaran program sosialisasi</li> <li>3. Tidak adanya lokasi yang sesuai untuk melaksanakan program</li> </ol>
<i>Factor external</i>		

<p><b>Opportunities :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DLH Kabupaten Pangkep memfasilitasi program bekerja sama dengan Kelurahan</li> <li>Adanya respon baik dari pihak pemerintah</li> </ol>	<p><b>Strategi SO :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Kerjasama antara DLH Kabupaten Pangkep dan Kelurahan Minasatene</li> <li>Memaksimalkan pendampingan ke masyarakat</li> </ol>	<p><b>Strategi WO :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyampaian sosialisasi yang menarik</li> <li>Menggunakan komunikasi dua arah</li> <li>Pembagian tempat sampah yang merata</li> </ol>
<p><b>Threats :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat tidak hadir tepat waktu pada saat sosialisasi</li> <li>Kuota tempat sampah yang masih kurang</li> <li>Cuaca yang tidak mendukung pada saat pelaksanaan</li> </ol>	<p><b>Strategi ST :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menstimulasi anggota masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program</li> <li>Melakukan pendampingan dan <i>monitoring</i></li> </ol>	<p><b>Strategi WT :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pemilahan sampah</li> <li>Memberikan ruang kepada pemerintah untuk terjun langsung ke masyarakat</li> </ol>

g. Jadwal dan Langkah-langkah

Tabel 2.16 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	08.00-08.30	Pembukaan	Seksi Acara	Pembukaan oleh Kepala Kantor Kelurahan Minasatene
2	08.30-10.00	Penyuluhan sosial	Seksi Acara	Materi : Pentingnya menjaga lingkungan dan pemilahan sampah Pemateri : DLH Kabupaten Pangkep
3	10.00-11.00	Pembagian Tempat Sampah	Seksi Acara	Kelurahan Minasatene bekerjasama dengan DLH Kabupaten Pangkep
4	11.00-11.15	Penutup	Seksi Acara	Foto bersama



h. Langkah-langkah

1) Pra Pelaksanaan

- a) Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, praktikan mengundang Kepala Kantor Kelurahan Minasatene, DLH Kabupaten Pangkep, dan masyarakat
- b) Kegiatan ini juga mengundang beberapa stakeholder diantaranya TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat
- c) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berlangsungnya sosialisasi dan pembagian tempat sampah adalah RW 04 Kelurahan Minasatene.

2) Pelaksanaan

- a) Sambutan oleh kepala Kelurahan Minasatene sekaligus
- b) Penyuluhan sosial dari DLH Kabupaten Pangkep
- c) Pembagian tempat sampah
- d) Penutup yang dirangkaikan dengan foto Bersama

3) Pasca Pelaksanaan

- a) Penyusunan laporan
- b) Dokumentasi sebagai bukti kegiatan

**F. Profil Analisis Penanggulangan Bencana**

**1. Gambaran Umum Masalah**

Angin puting beliung adalah salah satu jenis bencana alam dimana terdapat pusaran angin kencang dengan kecepatan tertentu. Biasanya, puting beliung terjadi karena perubahan sistem cuaca di suatu wilayah. Angin puting beliung juga merupakan angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan kumulonimbus. Angin ini memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas dan jangkauan yang terbilang sempit tetap menimbulkan kerusakan di wilayah yang mengalaminya.

Indonesia, adalah negara kepulauan yang terletak di antara dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, serta berada di antara dua samudera, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Berdasarkan letak geografis tersebut, tentu saja memberikan pengaruh terhadap perubahan angin Asia dan angin Australia yang bergantian ke arah garis khatulistiwa Indonesia. Terutama pada masa pancaroba, biasanya cuaca di Indonesia menjadi sulit untuk diprediksi. Pada masa tersebut, kerap muncul cuaca ekstrim yang berupa hujan badai, hujan es, petir, angin puting beliung, banjir, longsor, hingga gelombang tsunami. Angin puting beliung biasanya terjadi di area yang sangat lokal dengan waktu yang relatif singkat. Namun, meskipun terjadi dalam waktu yang relatif singkat, kerugian yang ditimbulkan tidaklah sedikit.

Di Indonesia tak sedikit kasus angin puting beliung yang menerjang

permukiman masyarakat, tak jarang merusak dan bahkan material bangunan yang rusak menimpa masyarakat mengakibatkan cedera bahkan merengg nyawa. Lingkungan pun menjadi berantakan dikarenakan puing-puing bangunan dan sampah yang berserakan terbawa oleh angin puting beliung. Kerugian material yang ditimbulkan juga dapat berupa bangunan fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas dan kantor pemerintah atau di lokasi apa saja yang ada angin puting beliungnya.

Beberapa rumah masyarakat yang ada di Kelurahan Minasatene mengalami kejadian serupa akibat terjangan angin puting beliung. Masyarakat yang kemudian tidak memiliki persiapan dan pemahaman mitigasi akan datangnya angin puting beliung hanya bisa pasrah melihat seng-seng penutup rumah dan beberapa barang berharga diterbangkan angin puting beliung.

## 2. Tinjauan Konsep

### a. Pengertian angin puting beliung

Angin puting beliung menjadi salah satu bencana alam yang banyak memberikan dampak negatif bagi manusia. Angin puting beliung itu berupa angin yang berputar secara kencang di permukaan bumi selama 3-5 menit. Angin ini biasanya seperti kolom udara yang berputar kencang. Angin puting beliung ini membentuk hubungan antara awan *cumulonimbus* dalam kejadian langka dari dasar awan *cumulus* dengan permukaan tanah.

Angin jenis ini biasanya muncul dengan bentuk seperti corong yang ujungnya seolah menyentuh permukaan bumi dan dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing sisa “dampak” dari angin tersebut.

Angin puting beliung ini biasanya membawa angin salju dengan kecepatan kurang lebih sekitar 175 km/jam dan lebar sekitar 250 kaki atau 75 meter, yang bergerak dalam beberapa kilometer sebelum akhirnya lenyap. Durasi terjadinya angin puting beliung biasanya singkat, antara 3-5 menit yang kemudian diikuti oleh adanya angin kencang.

Angin puting beliung berpotensi terjadi pada musim peralihan, yakni di waktu siang hari atau malam hari, sekitar pukul 13.00 hingga 17.00, tetapi juga kadang-kadang dapat terjadi pada malam hari.

Angin puting beliung dapat terjadi karena adanya pertemuan antara udara panas dan udara dingin, sehingga keduanya akan saling bertukar dan membentuk awan cumulonimbus hingga menjadi puting beliung. Suhu yang tinggi juga dapat menjadi penyebab terjadinya angin puting beliung. Selain itu, angin puting beliung dapat terjadi jika terjadi arus udara yang naik secara kuat di dalam awan.

### b. Proses terjadinya angin puting beliung

Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi ketika

musim pancaroba. Proses terjadinya berkaitan dengan adanya awan *cumulonimbus*, yang terbagi atas fase tumbuh, fase dewasa dan fase punah.

1) Fase tumbuh awan *cumulonimbus*

Pada fase ini, terdapat awan yang di dalamnya memiliki arus kuat yang naik ke atas. Ketika hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh adanya arus yang naik tersebut sebelum menuju ke puncak awan

2) Fase dewasa awan *cumulonimbus*

Pada fase ini, titik-titik air yang sudah tidak tertahan tersebut akan naik ke puncak awan. Ketika hujan telah turun, maka akan terjadi gaya gesek antara arus udara yang naik dan yang turun.

Adanya temperatur massa udara yang turun menjadi lebih dingin dari udara di sekelilingnya menimbulkan arus geser yang memutar lalu menjadi bentuk pusaran.

Semakin lama, arus udara tersebut akan bergerak semakin cepat hingga akhirnya membentuk sebuah corong yang menyentuh permukaan bumi. Kemudian, pada saat itulah sebuah angin puting beliung terjadi.

Namun, terkadang angin puting beliung juga muncul disertai hujan deras hingga dapat membentuk pancaran air atau *water spout*

3) Fase punah awan *cumulonimbus*

Pada fase ini, massa udara akan meluas pada seluruh awan, lalu berhenti dan kemudian angin puting beliung pun berakhir.

Hal tersebut karena tidak ada massa udara yang naik hingga kemudian massa udara turun secara meluas di seluruh awan. Ketika proses kondensasi berhenti, udara yang turun tersebut melemah hingga akhirnya angin puting beliung pun berakhir.

Proses kondensasi adalah proses perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair yang terjadi pada suhu udara di bawah titik embun

4) Ciri-ciri angin puting beliung

Adapun ciri-ciri dari angin puting beliung adalah sebagai berikut :

- a) Terjadi secara tiba-tiba selama 3-5 menit disekitar area local
- b) Memiliki bentuk yang beragam, biasanya berbentuk mirip corong/belalai gajah/selang *vacuum cleaner*
- c) Jika terjadi dalam waktu yang sangat lama, dapat menyebabkan kerusakan pada jalur lintasannya
- d) Sering terjadi pada siang hari, biasanya sekitar pukul 13.00 hingga 17.00
- e) Sering terjadi di daerah dataran rendah

- f) Terjadi pada musim pancaroba
  - g) Tidak ada angin puting beliung susulan
  - h) Tidak mempunyai siklus yang teratur
- 5) Dampak angin puting beliung
- Adapun dampak yang ditimbulkan dari terjadinya angin puting beliung adalah sebagai berikut :
- a) Menyebabkan kerusakan hingga kehancuran bangunan, baik itu rumah, Gedung, dan infrastruktur lainnya
  - b) Mengakibatkan banjir
  - c) Merusak jaringan listrik
  - d) Membahayakan keselamatan masyarakat hingga menelan korban jiwa
  - e) Dapat mengangkat dan memindahkan benda-benda disekitar yang tidak stabil
  - f) Kerusakan material dan non material
  - g) Mengganggu kegiatan ekonomi
  - h) Puing-puing dan sampah yang terbawa angin puting beliung menjadi berserakan
  - i) Merusak kebun milik masyarakat
  - j) Berpengaruh terhadap trauma korban
- 6) Mitigasi bencana angin puting beliung
- Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana alam. Berikut ini merupakan mitigasi yang dapat dilakukan ketika bencana angin puting beliung datang :
- a) Membangun bangunan dengan struktur yang mampu bertahan terhadap angin kencang
  - b) Memberlakukan adanya standar untuk bangunan, terutama di daerah yang rawan akan angin puting beliung
  - c) Cermat dalam penempatan lokasi pembangunan fasilitas umum supaya dapat terlindung dari serangan angin puting beliung
  - d) Masyarakat dibina mengenai cara penyelamatan diri ketika ada angin puting beliung
  - e) Untuk para nelayan, diharuskan mengikat kapalnya pada tiang penyangga secara kuat
  - f) Pengamanan barang-barang di sekitar rumah supaya tetap kuat dan tidak diterbangkan oleh angin
  - g) Segera berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian karena fenomena ini terjadi secara cepat
  - h) Melakukan penghijauan supaya udara tidak terlalu panas
  - i) Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi tetapi rapuh, lebih baik ditebang supaya tidak menjadi sasaran angin puting beliung.

- j) Bila terjadi angin puting beliung, lebih baik kita berada di dalam rumah dan menghindari posisi berdiri di dekat jendela kaca
- k) Segera matikan arus listrik, peralatan elektronik lainnya, serta kompor.
- l) Jika sedang mengendarai kendaraan, segera berhenti dan mencari tempat perlindungan yang aman.

### **3. Asesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

##### **1) Penyebab Masalah**

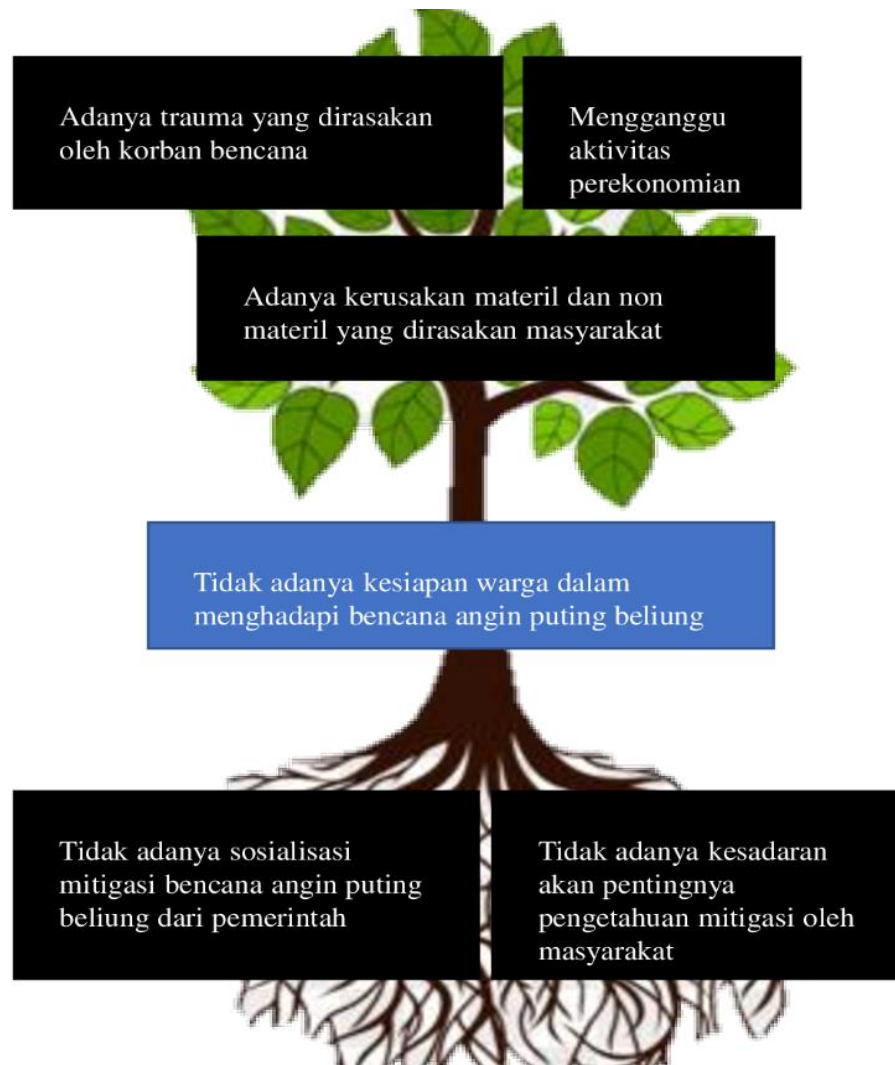
- a) Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung

Masyarakat masih tidak sadar akan pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung, padahal tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum yang meliputi upaya mengurangi tingkat risiko, pengelolaan sumber-sumber daya masyarakat, serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana.

- b) Kurangnya pemahaman dari pihak pemerintah kelurahan akan pentingnya sosialisasi mitigasi kepada masyarakat

Pemerintah dalam hal ini melayani masyarakat dalam memberikan pemahaman mitigasi bencana angin puting beliung dalam bentuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Instansi pemerintah kelurahan bisa bekerja sama dengan BPBD Kabupaten untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat menjadi wadah untuk masyarakat belajar mitigasi yang baik.

## 2) Analisis Pohon Masalah



Gambar 2.5 Analisis Pohon Masalah Profil Penanggulangan Bencana

## 3) Dampak Masalah

Dari hasil analisis pohon masalah, maka didapatkan dampak masalah sebagai berikut :

### a) Adanya kerusakan materil dan non materil

Banyak dampak kerusakan yang dapat dirasakan masyarakat oleh bencana angin puting beliung baik kerugian materil maupun non materil seperti rusaknya rumah, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas atau kantor pemerintahan bahkan kebun-kebun masyarakat juga bisa jadi sasaran angin ini. Tak sedikit masyarakat pun menjadi korban dan merengas nyawa apabila terkena reruntuhan material bangunan.

### b) Adanya trauma yang dirasakan korban bencana

Setiap orang yang mengalami suatu masalah ataupun musibah akan berbeda-beda responnya, namun banyak yang

justru merasakan trauma akibat terkena musibah. Sama seperti korban bencana angin puting beliung yang mungkin banyak merasakan kerugian dari bencana ini pasti akan merasakan sedih atau mungkin trauma akan kejadian tersebut.

c) Terganggunya aktivitas perekonomian

Ketika masyarakat yang terkena musibah bencana adalah seorang pedagang yang kebetulan membuka warung tentunya akan sangat merasakan dampak kerugian perekonomian, mengingat tempat mereka mencari nafkah rusak diterbangkan angin puting beliung.

4) Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu “Tidak Adanya Kesiapsiagaan Masyarakat Kelurahan Minasatene Dalam Menghadapi Bencana Angin Puting Beliung”

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan fokus masalah, identifikasi kebutuhan yang diperlukan sesuai permasalahan yang adalah :

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana angin puting beliung di Kelurahan Minasatene
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat tentang mitigasi bencana angin puting beliung di Kelurahan Minasatene
- 3) Meningkatkan kesadaran *stakeholder* untuk memberikan sosialisasi pentingnya mitigasi angin puting beliung di Kelurahan Minasatene

c. Identifikasi potensi Dan sumber

Adapun potensi dan sumber yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangkep

Dalam pelaksanaan Rencana Intervensi, BPBD Kabupaten Pangkep akan berperan sebagai pelaksana kebijakan mitigasi dan moneva mitigasi. BPBD Kabupaten Pangkep juga berperan sebagai *educator* terhadap masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.

2) Kelurahan Minasatene

Pemerintah Kelurahan Minasatene dalam rencana intervensi akan berperan sebagai fasilitator. Karena pemerintah menyediakan tempat kepada masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan edukasi dan wajib latih penanggulangan bencana.

3) Karang Taruna

Sebagai Karang Taruna di suatu masyarakat, dalam pelaksanaan rencana intervensi, karang taruna dapat berperan sebagai tenaga pembantu pelaksana perubahan. Secara bersama

sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial.

#### 4. Rencana Intervensi

##### a. Tujuan umum dan tujuan khusus

###### 1) Tujuan umum

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mitigasi bencana angin puting beliung masyarakat di Kelurahan Minasatene

###### 2) Tujuan khusus

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung
- b) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap angin puting beliung
- c) Menstimulasi pemerintah agar mensosialisasikan pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung

##### b. Bentuk kegiatan dan program

Dalam rencana pemecahan masalah ini akan berfokus pada tidak adanya kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Minasatene dalam menghadapi bencana angin puting beliung yakni melalui program “Minasatene Sadar Bencana Angin Puting Beliung” yang didalamnya terdapat kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut :

###### 1) Sosialisasi tentang pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dalam kegiatan ini tujuan dilaksanakannya Sosialisasi sendiri ditujukan agar masyarakat di Kelurahan Minasatene dapat mengetahui tentang pentingnya Mitigasi Bencana angin puting beliung. Adapun harapan dari terlaksananya sosialisasi ini adalah agar masyarakat di Kelurahan Minasatene lebih mengetahui tentang pentingnya Mitigasi Bencana angin puting beliung.

##### c. Sistem partisipan

Tabel 2.17 Sistem Partisipasi

No.	Jenis sistem	Sistem Representatif
1.	<i>Initiator System</i>	Pekerja sosial
2.	<i>Change Agent System</i>	1. Pekerja sosial 2. BPBD Kabupaten Pangkep 3. Karang taruna



3.	<i>Client System</i>	Masyarakat Kelurahan Minasatene
4.	<i>Support System</i>	1. Kantor Kelurahan Minasatene 2. BPBD Kabupaten Pangkep
5.	<i>Controlling System</i>	1. Kantor Kelurahan Minasatene 2. BPBD Kabupaten Pangkep
6.	<i>Implementing System</i>	1. Pekerja sosial 2. Karang taruna 3. Tokoh masyarakat
7.	<i>Target System</i>	Masyarakat Kelurahan Minasatene
8.	<i>Action System</i>	1. Pekerja sosial 2. Kantor kelurahan minatene 3. BPBD Kabupaten Pangkep 4. Karang taruna 5. Tokoh masyarakat

d. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada adalah Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/Pengembangan Organisasi (*Community Oraganization/CD*). Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/Pengembangan Organisasi (*Community Oraganization/CD*) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Beberapa Teknik yang digunakan praktikan antara lain :

1) Penyuluhan sosial

Penyuluhan Sosial adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai gerak dasar dan awal untuk bisa lebih memberikan kesiapan dan manfaat program bagi masyarakat sasaran yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan, kepercayaan dan keyakinan akan perubahan serta kesadaran dari masyarakat sasaran agar memiliki rasa tanggung jawab penuh dalam diri sendiri.

2) *Monitoring* dan evaluasi

*Monitoring* adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. *Monitoring* dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi merupakan proses pengukuran akan

efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasil dari evaluasi selanjutnya akan digunakan sebagai analisis program selanjutnya

e. Rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan

Tabel 2.18 Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK	2 Paket	100.000,00	200.000,00
2	Sound system	1 unit	150.000,00	150.000,00
3	Banner kegiatan	1 lembar	75.000,00	75.000,00
4	Infokus dan proyektor	1 unit	200.000,00	200.000,00
5	Honor narasumber	2 (orang/jam)	1.000.000,00	2.000.000,00
6	Konsumsi	50 box	15.000,00	750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.375.000,00</b>

f. Analisis kelayakan program

Tabel 2.19 Tabel Analisis SWOT

<i>Factor internal</i>	<p><b>Strength :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya narasumber yang berkompeten</li> <li>2. Kegiatan didukung oleh pemerintah</li> <li>3. Adanya respon baik dari masyarakat</li> </ol>	<p><b>Weakness :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemungkinan masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi</li> <li>2. Belum menyeluruhnya sosialisasi</li> <li>3. Tidak cukupnya anggaran</li> </ol>
<i>Factor external</i>	<p><b>Strategi SO :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Kerjasama antara BPBD Kabupten Pangkep dan Kelurahan Kelurahan</li> <li>2. Memaksimalkan pendampingan kepada masyarakat</li> <li>3. Melakukan</li> </ol>	<p><b>Strategi WO :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian sosialisasi yang menarik</li> <li>2. Menggunakan komunikasi dua arah</li> <li>3. Mendata rumah masyarakat yang sudah</li> </ol>
	<p><b>Opportunities :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat yang sudah sadar tentang pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung</li> <li>2. Kelurahan yang sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat</li> </ol>	

3. Adanya Kerjasama dari BPBD Kabupaten Pangkep	monitoring terhadap perkembangan pola perilaku masyarakat	terkena angin puting beliung
<p><b>Threats :</b></p> 1. Masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif 2. Cuaca yang tidak mendukung pada saat pelaksanaan 3. Narasumber yang tidak dapat hadir 4. Tidak adanya lokasi yang strategis untuk melaksanakan kegiatan	<p><b>Strategi ST :</b></p> 1. Menstimulasi masyarakat untuk aktif berpartisipasi 2. Melakukan pendampingan dan monitoring 3. Menjalin hubungan yang baik dengan BPBD Kabupaten Pangkep dan Kelurahan Minasatene	<p><b>Strategi WT :</b></p> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana angin puting beliung 2. Membangun komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah

g. Jadwal dan Langkah-langkah

Tabel 2.20 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1	08.00-08.30	Pembukaan	Seksi Acara	Pembukaan oleh Kepala Kantor Kelurahan Minasatene
2	08.30-10.00	Penyuluhan sosial	Seksi Acara	Materi : Mitigasi bencana angin puting beliung Pemateri : BPBD Kabupaten Pangkep
3	10.00-11.00	Diskusi dan tanya jawab	Seksi Acara	Moderator : praktikan
4	11.00-11.15	Penutup	Seksi Acara	Foto bersama

1) Langkah-langkah

a) Pra Pelaksanaan

- (1) Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan, praktikan mengundang Kepala Kantor Kelurahan Minasatene, BPBD Kabupaten Pangkep, Karang taruna dan masyarakat

(2) Kegiatan ini juga mengundang beberapa stakeholder diantaranya TKSK dan Pekerja Sosial Masyarakat.

(3) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berlangsungnya sosialisasi adalah aula kantor Kelurahan Minasatene.

2) Pelaksanaan

- a) Sambutan oleh kepala Kelurahan Minasatene sekaligus membuka kegiatan sosialisasi
- b) Penyuluhan sosial dari BPBD Kabupaten Pangkep
- c) Sesi diskusi dan tanya jawab
- d) Penutup yang dirangkaikan dengan foto Bersama

3) Pasca Pelaksanaan

- a) Penyusunan laporan
- b) Dokumentasi sebagai bukti kegiatan

### III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah terlaksana yaitu Profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Dan dari kegiatan praktikum laboratorium ini, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktikum secara langsung di lapangan. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan saat mencari data terkait isu-isu profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial di lokasi praktikum.

Secara garis besar manfaat lain yang mahasiswa dapatkan dari kegiatan praktikum ini yaitu kemampuan menganalisis yang dimiliki mahasiswa meningkat. Mahasiswa mendapat pengetahuan-pengetahuan baru terkait profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang sebelumnya belum diperoleh pada saat belajar di dalam ruang kelas perkuliahan. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam dan luas tentang dunia kerja profesi Pekerja Sosial, sehingga mahasiswa menjadi semakin termotivasi dan yakin akan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi Pekerja Sosial yang dimiliki.

#### B. Rekomendasi

##### 1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada prodi adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat bekerjasama dengan Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar pengalaman dan keterampilan mahasiswa dapat lebih berkembang.
- b. Mengundang narasumber yang berpengalaman di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar mahasiswa dapat mengetahui peluang kerja yang dimiliki Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

##### 2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

Adapun rekomendasi yang diberikan kepada Politeknik Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
- b. Diharapkan dapat mendukung mahasiswa dalam aktif di lapangan dan mengikutkan mahasiswa pelatihan yang berhubungan dengan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta. (2010). *Kelompok Usaha Bersama (KUBE)*.
- Hanifah. (2023, February 27). Syarat Dan Cara Mendapatkan Bantuan Bedah Rumah Dari Pemerintah.
- Permensos No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial [Jdih bpk ri]. (n.d.). Database Peraturan [JDIH BPK RI].
- Lfe, Jim dan Frank Teseriero. 2008. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ppks. (n.d.). mandalikes. [wargapedia.mandalajati.bandung.go.id/mandalikes/ppks](http://wargapedia.mandalajati.bandung.go.id/mandalikes/ppks)
- Hestanto. Jaringan Usaha Dalam Usaha Kecil Menengah. Diakses dari <https://djsn.go.id/storage/app/media/petajalan/FA%20RingkasanDigitalDistribution-edit.pdf>
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Diakses dari <https://kemensos.go.id/kube>
- Penyebab dan Proses Terjadinya Angin Putting Beliung. Diakses pada <https://www.gramedia.com/best-seller/angin-puting-beliung/>
- Ekowati. (2022, June 7). *Mengenal Pengertian DTKS Kemensos, data Acuan untuk Menentukan Penerima Bansos*. Pikiran Rakyat Depok. Retrieved May 5, 2023, [depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094669821/mengenal-pengertian-dtks-kemensos-data-acuan-untuk-menentukan-penerima-bansos?page=3](http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094669821/mengenal-pengertian-dtks-kemensos-data-acuan-untuk-menentukan-penerima-bansos?page=3)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Tanggoro, Dwi. 2000. *Utilitas Bangunan*. Universitas Indonesia: Jakarta. Ruli. 2010. *Rumah Tidak Layak Huni* Kota Surakarta. Surakarta
- Transect walk. Scientific Social Work Discussion. (n.d.). Retrieved April 28, 2023, from <https://sswdstks.wordpress.com/tag/transect-walk/>
- Warna-Warni Tempat Sampah Ada Artinya, Tahukah? (n.d.). Retrieved April 28, 2023, from <https://sampahlaut.id/2022/07/03/warna-warni-tempat-sampah-ada-artinya-tahukah/>
- Widiyanto. (2005). *Pemberdayaan Komunitas Petani Miskin Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama; Kasus KUBE Ternak Sapi di Desa Beji Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Bogor: IPB
- Definisi Rumah Tidak Layak Huni. (2021, February 17). [perkim.id](http://perkim.id).

Karang taruna. (n.d.). Kelurahan Rejosari. <https://rejosari.semarangkota.go.id/karangtaruna>

Tamus Tahir || 08114180521. (n.d.). Kelurahan Minasatene. Beranda.

Defitri, M. (2022, December 13). 5 Warna Tempat Sampah Ternyata Punya Fungsi Berbeda. Waste4Change.

Admin. (2023, April 18). Warna-warni Tempat Sampah ada Artinya, Tahukah? Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut

Kompas Cyber Media. (2022, April 5). Pengertian Angin Puting Beliung, Penyebab, Dan Dampaknya. KOMPAS.com.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. 29 Mei 2012.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pembekalan Praktikum Laboratorium

#### 1. Pemberkalan Analis Jaminanan Sosial

Narasumber : Gayatri Waditra Nirwesti

Tanggal : 02 Februari 2023



#### 2. Pembekalan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Narasumber : Tonton Heriyanto (CSR Manager PT. AAPC Indonesia)

Tanggal : 22 Februari 2023





3. Pembekalan Analis Pemberdayaan Sosial

Narasumber : Samsul Maarif (Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur)

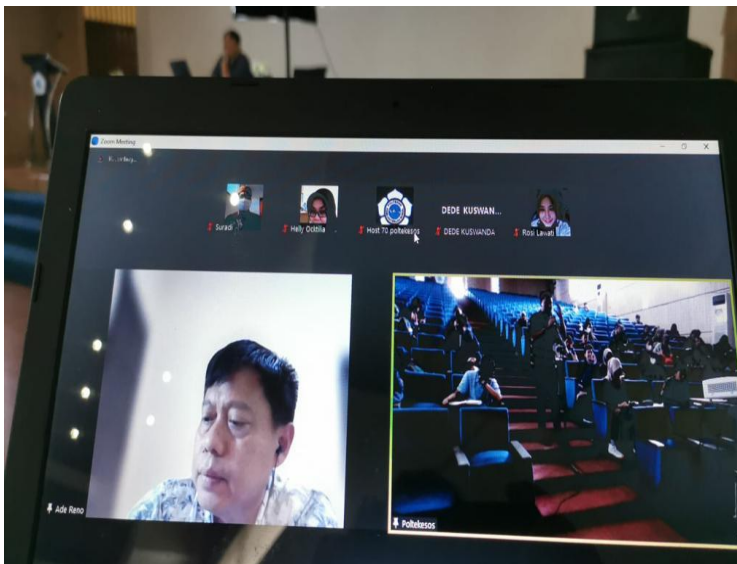
Tanggal : 8 Maret 2023



4. Pembekalan Analis Penata lingkungan Sosial

Narasumber : Samsul Maarif (Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur)

Tanggal : 24 Maret 2023



5. Pembekalan oleh Dosen Pembimbing

Dosen : Suradi

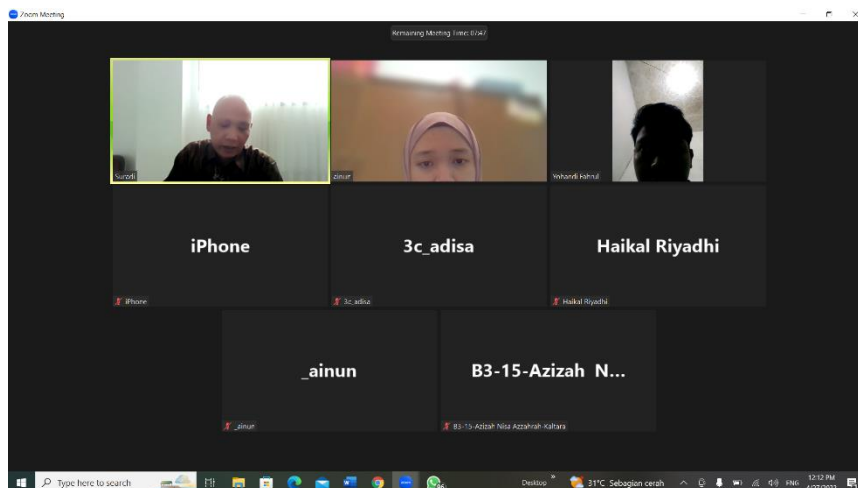
Tanggal : 23 Februari 2023



6. Pembekalan oleh Dosen Pembimbing

Dosen : Suradi

Tanggal : 27 April 2023



## Lampiran 2 : Kegiatan Praktikum Laboratorium

### 1. Kegiatan praktikum bersama rekan kelompok



### 2. Mewawancarai Penerima Bantuan Rutilahu



### 3. Mewawancarai beberapa anggota KUBE Katrisala

